

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

2022

**BKPSDMD
KOTA PANGKALPINANG**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2022 dapat disusun dan diterbitkan. Semoga kita selalu berupaya untuk terus meningkatkan komitmen dan produktifitas kinerja yang optimal dalam setiap pelaksanaan tugas. Penyusunan LAKIP ini dimaksudkan sebagai komitmen serta tekad untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi hasil sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023.

Penyusunan LAKIP BKPSDMD ini telah diupayakan sebaik mungkin, walaupun demikian LAKIP BKPSDMD ini tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan sehubungan dengan kendala-kendala yang dihadapi. Kami mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun guna penyempurnaan LAKIP Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang pada tahun-tahun berikutnya.

Semoga penyajian LAKIP BKPSDMD Kota Pangkalpinang Tahun 2022 ini dapat menjadi sarana evaluasi kinerja selama satu tahun, serta dapat menjadikan umpan balik bagi upaya perbaikan kinerja pada masa yang akan datang agar dapat melaksanakan kinerja secara lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari proses perencanaan, penganggaran maupun koordinasi pelaksanaannya.

Pangkalpinang, Januari 2022



DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Gambaran Umum Organisasi	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Struktur Organisasi dan Tupoksi BKPSDMD	5
1.4.1 Struktur Organisasi	5
1.4.2 Tupoksi BKPSDMD	8
1.4.3 Permasalahan dan Isu Strategis BKPSDMD	22
1.5 Sistematika Penyusunan LAKIP Tahun 2022.....	22
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Perencanaan Kinerja	24
2.1.1 Tujuan dan Sasaran BKPSDMD Kota Pangkalpinang	24
2.1.2 Strategi dan Arah Kebijakan	26
2.2 Rencana Kinerja Tahun Anggaran 2022.....	29
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2022.....	31
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja	34
3.1.1 Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci (IKK)	35
3.1.2 Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU)	36
3.1.3 Capaian Kinerja Program / Kegiatan	41
3.2 Perbandingan Capaian Kinerja sampai dengan Tahun 2021	54
1. Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK)	54
2. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)	57
3. Capaian Indikator Kinerja Program / Kegiatan	62
3.3 Analisis Ketersediaan SDM dalam Pencapaian Tujuan dan Sasaran	66
3.4 Realisasi Anggaran	66
BAB IV PENUTUP	72

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan akan dapat dikatakan berhasil jika mampu mewujudkan aspirasi dan tuntutan masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita yang diharapkan dengan menerapkan penyelenggaraan *good governance*. Di samping itu, diperlukan suatu sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan *legitimate*. *Good governance* yang dimaksud adalah merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan *public good and services* disebut *governance* (pemerintahan atau pemerintahan), sedangkan praktik terbaiknya disebut "*good governance*" (kepemerintahan yang baik). Agar "*good governance*" dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik, maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah, *private sector* dan masyarakat.

Good governance yang efektif menuntut adanya "*alignment*" (koordinasi) yang baik dan integritas, profesional serta etos kerja dan moral yang tinggi, dengan demikian penerapan konsep *good governance* penyelenggaraan kekuasaan pemerintah negara merupakan tantangan tersendiri. Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Berkenaan dengan itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas KKN. Perlu diperhatikan pula adanya mekanisme untuk meregulasi akuntabilitas pada setiap instansi pemerintah dan memperkuat peran dan kapasitas parlemen, serta tersedianya akses yang sama bagi masyarakat luas akan ketersediaan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan.

Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi tanggungjawab manajerial pada tiap lingkungan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian. Masing-masing individu pada setiap jajaran aparatur bertanggung jawab atas kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya. Konsep inilah yang membedakan adanya kegiatan yang terkendali (*controllable activities*) dengan kegiatan yang tidak terkendali (*uncontrollable activities*). Kegiatan yang terkendali

merupakan kegiatan yang secara nyata dapat dikendalikan oleh seseorang atau suatu pihak. Ini berarti, kegiatan tersebut benar-benar direncanakan, dilaksanakan dan dinilai hasilnya oleh pihak yang berwenang.

Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Sejalan dengan hal tersebut, telah ditetapkan TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Berikutnya, sebagai kelanjutan dari produk hukum tersebut diterbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), dan setelah melalui proses panjang dikuatkan dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah setiap Pemerintah Daerah diminta untuk menyampaikan **Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)** kepada Presiden, sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir anggaran. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

LAKIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai Kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*. Dalam perspektif yang lebih luas, maka LAKIP berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Semua itu memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh lembaga pemerintahan pusat dan daerah serta partisipasi masyarakat.

Beranjak dari Perubahan Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2018 –

2023, Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang (Renja) dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta memperhatikan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, penyusunan LAKIP Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2022 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja Tahun 2022 dan Indikator Kinerja Utama Perubahan 2021-2023.

Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran Renstra dan realisasi pencapaian indikator kinerja sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja, dengan demikian, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang ini yang menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintahan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dan jajarannya kepada Walikota ini telah disusun dan dikembangkan sesuai peraturan yang berlaku. Realisasi yang dilaporkan dalam LAKIP ini merupakan hasil pencapaian sasaran pada tahun 2022.

1.2 Gambaran Umum Organisasi

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang merupakan unsur penunjang perangkat daerah bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang dan berdasarkan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 57 Tahun 2016, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang mempunyai tugas pokok **“Melaksanakan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan”**, dan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;
2. Penetapan rencana strategis badan untuk mendukung visi dan misi Kota Pangkalpinang dan kebijakan Walikota;
3. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Kota Pangkalpinang bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;
4. Penetapan rencana kerja badan menurut skala prioritas dan mendistribusikannya kepada bawahan;
5. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;
6. Pelaksanaan perencanaan bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;
7. Pengkoordinasian dan pelaksanaan dibidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah di lingkungan Kota termasuk dukungan dana, sarana dan prasarana Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah berkewajiban untuk meningkatkan manajemen pemerintahan yang lebih efisien, efektif dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Untuk itu setiap instansi pemerintah serta unit-unit kerja yang ada diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disusun sebagai perwujudan pertanggungjawaban instansi pemerintah selaku pengelola sumber daya yang tersedia dalam rangka menjalankan program dan kegiatan dalam mewujudkan Visi dan Misi organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Laporan Akuntabilitas dibuat untuk memberikan informasi mengenai kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang selama satu tahun anggaran. Laporan ini memuat sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan berjalan sesuai dengan Misi dan sejalan dengan sasaran serta tujuan organisasi. Evaluasi kinerja dilakukan untuk dapat memberikan masukan dalam mengatasi permasalahan yang ada sehingga dapat mendorong usaha-usaha yang berkelanjutan dalam perbaikan dan peningkatan kinerja instansi pemerintah di masa yang akan datang.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

➤ **Maksud Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yaitu :**

Maksud disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang adalah melaksanakan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

➤ **Tujuan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yaitu :**

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja;
3. Mengetahui dan menilai keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab instansi.

1.4 STRUKTUR ORGANISASI DAN TUPOKSI BKPSDMD

1.4.1. Struktur Organisasi

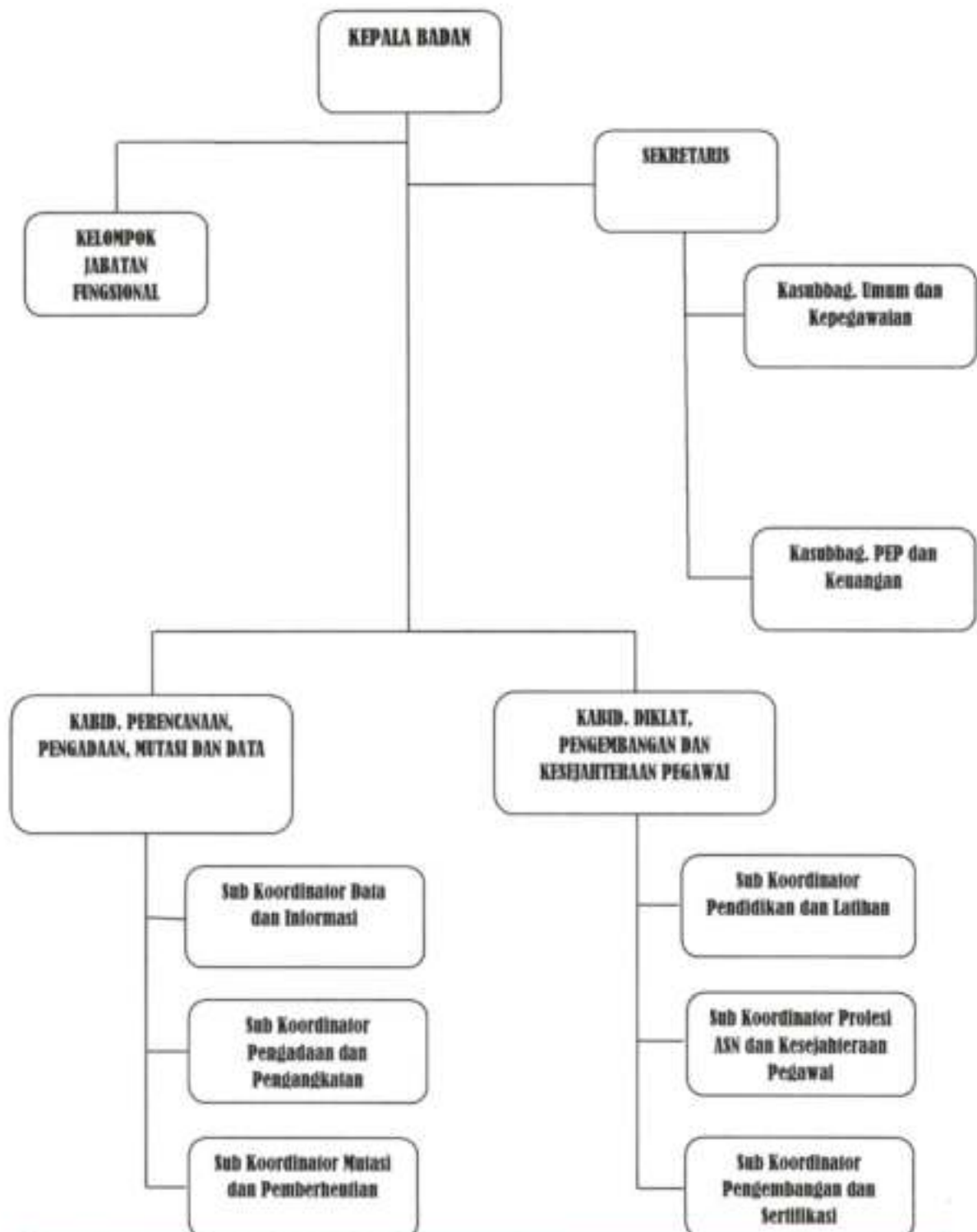
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18), Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang mempunyai struktur organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Badan
2. Sekretaris, membawahi 2 sub.bagian yaitu :

- a. Sub.bagian umum dan kepegawaian
- b. Sub.bagian perencanaan, evaluasi, pelaporan dan keuangan
- 3. Bidang Perencanaan, Pengadaan, Mutasi dan Data, membawahi 3 seksi yaitu :
 - a. Sub Koordinator Data dan Informasi
 - b. Sub Koordinator Pengadaan dan Pengangkatan
 - c. Sub Koordinator Mutasi dan Pemberhentian
- 4. Bidang Diklat dan Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai, membawahi 3 Seksi, yaitu:
 - a. Sub Koordinator Pendidikan dan Latihan
 - b. Sub Koordinator Profesi ASN dan Kesejahteraan Pegawai
 - c. Sub Koordinator Pengembangan dan Sertifikasi

Dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, fungsi-fungsi manajemen kepegawaian dibagi habis sesuai dengan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang sebagai berikut :

Gambar 1.1



1.4.2 Tupoksi BKPSDMD

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah merupakan unsur penunjang perangkat daerah bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

- (1) Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis bidang Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah;
 - b. Penetapan rencana strategis badan untuk mendukung visi dan misi Kota Pangkalpinang dan kebijakan Walikota;
 - c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Kota Pangkalpinang bidang Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah;
 - d. Penetapan rencana kerja badan menurut skala prioritas dan mendistribusikannya kepada bawahan;
 - e. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah;
 - f. Pelaksanaan perencanaan bidang Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah;
 - g. Pengkoordinasian dan pelaksanaan dibidang Kepegawaian dan Pengembangan SDM di lingkungan Kota termasuk dukungan dana, sarana dan prasarana Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah; dan
 - h. Pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut diatas, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah membawahi :

1. Sekretaris

- (1) Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan administratif dan fungsional kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah,
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan koordinasi kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah;
 - b. penyusunan rencana program dan anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah;
 - c. penyelenggaraan urusan ketatausahaan rumah tangga, kepegawaian, hukum dan organisasi serta hubungan masyarakat Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah;
 - d. penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, tindak lanjut LHP dan pengelolaan sarana Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah; dan
 - e. pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud di atas, Sekretaris membawahi 2 (dua) Sub Bagian meliputi:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan.

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah.
- (2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi serta pelayanan informasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah.
- (3) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah;
 - b. pelaksanaan pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan, penyelenggaraan kerumahtanggaan, dan pengelolaan perlengkapan Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah;
 - c. pelaksanaan administrasi kepegawaian yang meliputi perencanaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian (kenaikan gaji berkala, cuti, disiplin, pengembangan, dan kesejahteraan pegawai);
 - d. pengelolaan dan pemeliharaan serta pelaporan barang milik/kekayaan daerah lingkup Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah;
 - e. pengelolaan jaringan informasi dan komunikasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah; penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pemberian pelayanan informasi kepada publik; pelaksanaan verifikasi bahan informasi publik; pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan; pemutakhiran informasi dan dokumentasi; penyediaan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat; penyampaian informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi secara berkala; dan
 - f. pelaporan pelaksanaan kegiatan administrasi Umum dan Kepegawaian Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah.

2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan

- (1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan yang bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah.
- (2) Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan administrasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah.
- (3) Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan bahan perencanaan program dan kegiatan (Renstra, Renja, dan Perjanjian Kinerja, Rencana Umum Penganggaran, RKA/DPA Kesekretariatan) Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah;
 - b. penyusunan bahan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan (Laporan Evaluasi Renja dan Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah;
 - c. penyusunan laporan akhir pelaksanaan program dan kegiatan (LAKIP, LPPD LKPJ) Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah
 - d. pelaksanaan analisis keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah;
 - e. perbendaharaan, verifikasi, akuntansi, monitoring evaluasi anggaran, Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah;
 - f. pelaporan keuangan (Semesteran dan Akhir Tahun) Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah;
 - g. pelaksanaan administrasi pengelolaan barang milik/kekayaan daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah; dan
 - h. pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan.

2. Bidang Diklat, Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai

- (1) Bidang Diklat, Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Diklat, Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah.
- (2) Kepala Bidang Diklat, Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi bidang Diklat, Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah.
- (3) Kepala Bidang Diklat, Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana program dan kegiatan lingkup Diklat, Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai;
 - b. penyusunan petunjuk teknis lingkup Diklat, Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai;
 - c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Diklat, Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai;
 - d. pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia lingkup Diklat, Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Diklat, Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai; dan
 - f. pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi di atas, Kepala Bidang Diklat, Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai membawahi 3 (tiga) Seksi meliputi:

1. Sub koordinator Pendidikan dan Latihan;
2. Sub koordinator Pengembangan dan Sertifikasi; dan
3. Sub koordinator Profesi ASN dan Kesejahteraan Pegawai.

1. Sub Koordinator Pendidikan dan Latihan
 - (1) Seksi Pendidikan dan Latihan dipimpin oleh seorang Sub Koordinator Pendidikan dan Latihan yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Diklat, Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai.
 - (2) Sub Koordinator Pendidikan dan Latihan mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Pendidikan dan Latihan.
 - (3) Sub Koordinator Pendidikan dan Latihan mempunyai fungsi:
 - a. pengumpulan dan pengelolaan data lingkup Pendidikan dan Latihan
 - b. pelaksanaan analisa kebutuhan diklat;
 - c. penyusunan rencana teknis pengembangan sistem diklat, kurikulum, silabi, modul dan metode pembelajaran diklat;
 - d. penyusunan rencana jadwal diklat, calon peserta diklat dan widyaiswara; dan
 - e. pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Pendidikan dan Latihan.
2. Sub Koordinator Pengembangan dan Sertifikasi
 - (1) Seksi Pengembangan dan Sertifikasi dipimpin oleh seorang Sub Koordinator Pendidikan dan Latihan yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Diklat, Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai.
 - (2) Sub Koordinator Pengembangan dan Sertifikasi mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Pendidikan dan Latihan.
 - (3) Sub Koordinator Pengembangan dan Sertifikasi mempunyai fungsi:
 - a. pengumpulan dan pengelolaan data lingkup Pengembangan dan Sertifikasi;
 - b. pendataan penyusunan riwayat pegawai/*track record* pegawai;
 - c. penyusunan rencana dan pengkajian pengembangan karier pegawai dan profesionalisme pegawai;
 - d. penyelenggaraan peningkatan dan pembinaan karier pegawai;
 - e. pelaksanaan keikutsertaan dan kebutuhan diklat pegawai dalam rangka pengembangan karier pegawai dan profesionalisme pegawai; dan

f. pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Pengembangan dan Sertifikasi.

3. Sub Koordinator Profesi ASN dan Kesejahteraan Pegawai

- (1) Seksi Profesi ASN dan Kesejahteraan Pegawai dipimpin oleh seorang Sub Koordinator Profesi ASN dan Kesejahteraan Pegawai yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Diklat, Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai.
- (2) Sub Koordinator Profesi ASN dan Kesejahteraan Pegawai mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Profesi ASN dan Kesejahteraan Pegawai.
- (3) Sub Koordinator Profesi ASN dan Kesejahteraan Pegawai mempunyai fungsi:
 - a. pengumpulan dan pengelolaan data lingkup Profesi ASN dan Kesejahteraan Pegawai;
 - b. pendataan, peningkatan, pengusulan dan pengembangan kesejahteraan pegawai;
 - c. pemberian tanda jasa;
 - d. pembekalan, pembinaan dan pengembangan fisik serta mental pegawai; dan
 - e. pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Profesi ASN dan Kesejahteraan Pegawai.

3. Bidang Perencanaan, Pengadaan, Mutasi dan Data

- (1) Bidang Perencanaan, Pengadaan, Mutasi dan Data dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Perencanaan, Pengadaan, Mutasi dan Data yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah.
- (2) Kepala Bidang Perencanaan, Pengadaan, Mutasi dan Data mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi bidang Perencanaan, Pengadaan, Mutasi dan Data kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah.

(3) Kepala Bidang Perencanaan, Pengadaan, Mutasi dan Data mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana program dan kegiatan lingkup Perencanaan, Pengadaan, Mutasi dan Data;
- b. penyusunan petunjuk teknis lingkup Perencanaan, Pengadaan, Mutasi dan Data;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Perbendaharaan lingkup Perencanaan, Pengadaan, Mutasi dan Data;
- d. pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia lingkup Perencanaan, Pengadaan, Mutasi dan Data;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup Perencanaan, Pengadaan, Mutasi dan Data; dan
- f. pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Bidang Perencanaan, Pengadaan, Mutasi dan Data membawahi 3 (tiga) Seksi meliputi:

- a. Sub Koordinator Pengadaan dan Pengangkatan;
- b. Sub Koordinator Mutasi dan Pemberhentian; dan
- c. Sub Koordinator Perencanaan, Data dan Informasi.

1. Sub Koordinator Pengadaan dan Pengangkatan

- (1) Seksi Pengadaan dan Pengangkatan dipimpin oleh seorang Sub Koordinator Pengadaan dan Pengangkatan yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan, Pengadaan, Mutasi dan Data.
- (2) Sub Koordinator Pengadaan dan Pengangkatan mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Pengadaan dan Pengangkatan.
- (3) Sub Koordinator Pengadaan dan Pengangkatan mempunyai fungsi:
 - a. pengumpulan dan pengelolaan data lingkup Pengadaan dan Pengangkatan
 - b. pelaksanaan pengadaan ASN tingkat kota;

- c. pengusulan pengadaan NIP;
- d. penyusunan bahan penetapan kebijakan pengangkatan CASND tingkat kota;
- e. pelaksanaan pengangkatan CASND tingkat kota;
- f. penyusunan bahan penetapan CASND menjadi ASND tingkat kota;
- g. penetapan kenaikan pangkat ASND kota menjadi golongan ruang I/b sampai dengan III/d;
- h. pengusulan penetapan kenaikan pangkat anumerta dan pengabdian;
- i. penyusunan bahan penetapan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian ASND kota dalam dan dari Jabatan Tinggi Pratama atau Jabatan Fungsional yang jenjangnya setingkat, kecuali pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Sekretaris Daerah Kota;
- j. pengusulan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Sekretaris Daerah Kota;
- k. pengusulan konsultasi pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
- l. penyelesaian administrasi pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan pangkat pegawai; dan
- m. pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Pengadaan dan Pengangkatan.

2. Sub Koordinator Mutasi dan Pemberhentian

- (1) Seksi Mutasi dan Pemberhentian dipimpin oleh seorang Sub Koordinator Mutasi dan Pemberhentian yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan, Pengadaan, Mutasi dan Data.
- (2) Sub Koordinator Mutasi dan Pemberhentian mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Mutasi dan Pemberhentian.
- (3) Sub Koordinator Mutasi dan Pemberhentian mempunyai fungsi:
 - a. pengumpulan dan pengelolaan data lingkup Mutasi dan Pemberhentian
 - b. penyusunan bahan penetapan perpindahan ASND kota;
 - c. penyusunan bahan penetapan pemberhentian ASND kota golongan ruang III/d ke bawah dan pemberhentian sebagai CASND kota;

- d. pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian skala kota;
- e. penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan manajemen ASN dilingkungan kota;
- f. penyelenggaraan Mutasi dan Pembinaan pangkat, Mutasi dan Pembinaan jabatan, Mutasi dan Pembinaan antar daerah;
- g. penyusunan rencana mutasi, rotasi pegawai, pengadaan administrasi status hukum kepegawaian;
- h. supervisi terkait disiplin pegawai dan pemberhentian pegawai;
- i. pengelolaan kenaikan gaji berkala;
- j. pemberian pensiun bagi PNS; dan
- k. pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Mutasi dan Pemberhentian.

3. Sub Koordinator Data dan Informasi

- (1) Seksi Data dan Informasi dipimpin oleh seorang Sub Koordinator Data dan Informasi yang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan, Pengadaan, Mutasi dan Data.
- (2) Sub Koordinator Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi dan pelaporan di lingkup Perencanaan, Data dan Informasi.
- (3) Sub Koordinator Data dan Informasi mempunyai fungsi:
 - a. pengumpulan dan pengelolaan data lingkup Perencanaan, Data dan Informasi;
 - b. pendataan pegawai;
 - c. pemetaan kuantitas dan kualitas pegawai pada setiap satuan organisasi perangkat daerah;
 - d. perencanaan kebutuhan pegawai dan rencana pendistribusian pegawai;
 - e. penyusunan formasi ASND setiap tahun anggaran;
 - f. penyusunan bahan penetapan formasi ASND setiap tahun anggaran;
 - g. pengusulan formasi ASND setiap tahun anggaran;
 - h. pengumpulan dan penyimpanan data dan arsip pegawai;
 - i. pengelolaan dan pengembangan sistem informasi manajemen kepegawaian (SIMPEG);

- j. penyelenggaraan penyajian dan layanan data dan informasi kepegawaian; dan
- k. pelaporan pelaksanaan kegiatan lingkup Perencanaan, Data dan Informasi.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 didukung oleh ASN sebanyak 28 Orang dan PHL 16 Orang. Adapun komposisi ASN pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai di Lingkungan BKPSDMD Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Sesuai Bidang Penugasan	Pegawai		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
ASN dan CASN				
1.	SMA	4	1	5
2.	D3	3	5	8
4.	S1	8	6	14
5.	S2	-	1	1
6.	S3	-	-	-
	Jumlah	15	13	28
NON ASN				
1.	SMA	3	2	5
2.	S1	2	8	10
3.	SD	1	-	1
	Jumlah	6	10	16

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian BKPSDMD Kota Pangkalpinang (Desember 2022).

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai di Lingkungan BKPSDMD Berdasarkan Golongan

No.	Sesuai Bidang Penugasan	Pegawai		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
Aparatur Sipil Negara				
1.	Pembina Utama Muda, IV/c	-	-	-
2.	Pembina Tingkat I, IV/b	-	-	-
3.	Pembina, IV/a	1	1	2
4.	Penata Tingkat I, III/d	5	3	8
5.	Penata, III/c	-	1	1
6.	Penata Muda Tingkat I, III/b	-	3	3
7.	Penata Muda, III/a	3	4	7
8.	Pengatur Tingkat I, II/d	5	-	5
9.	Pengatur, II/c	1	1	2
10.	Pengatur Muda Tingkat I, II/b	-	-	-
11.	Pengatur Muda, II/a	-	-	-
	Jumlah	15	13	28

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian BKPSDMD Kota Pangkalpinang (Desember 2022).

Tabel 1.3
Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi
Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang

No	Sarana/ Prasarana	Jumlah Tahun 2022	Kondisi (Baik/ Rusak)
1	2	3	4
1	Gedung	1	Baik
2	Kendaraan Dinas		
	- Roda 4	5	Baik
	- Roda 2	6	Baik
3	Termometer standar	1	Baik
4	Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	2	Baik
5	Lemari Besi	3	Baik
6	Rak Besi/Metal	12	Baik
7	Filling Besi/Metal	15	Baik
8	Brand Kas	1	Baik
9	Rotary Filling	3	Baik
10	Lemari Sorok	2	Baik
11	Lemari Kaca	1	Baik
12	Lemari Makan	1	Baik
13	Lemari kayu	2	Rusak Berat
14	Alat Penghancur Kertas	5	Baik
15	Papan Nama Instansi	1	Baik
16	Papan Pengumuman	1	Baik
17	Papan Absen	2	Baik
18	CCTV	1	Baik
19	Copy Board/Elektrik White Board	2	Baik
20	Mesin Absensi	1	Rusak Berat
21	Panel Pameran	1	Baik
22	Papan Nama Ruangan/Jabatan	1	Baik
23	Meja Kayu/Rotan	6	Baik
24	Meja Rapat	2	Baik
25	Meja Reseption	1	Baik
26	Kursi Rapat	35	Baik
27	Kursi Tamu	1	Baik
28	Kursi Putar	11	8 Baik, 2 Kurang Baik 1 Rusak Berat
29	Meja Biro	4	Baik
30	Sofa	1	Baik
31	Kursi Kerja	12	11 Baik 1 Rusak Berat
32	Rak TV	1	Baik
33	Karpet	3	Baik
34	Mesin Penghisap Debu/Vacum Cleaner	1	Baik
35	Lemari Es	1	Rusak Berat
36	Personal Komputer lainnya	8	Baik

37	AC Unit	15	11 Baik, 1 Kurang Baik 3 Rusak Berat
38	Dispenser	9	7 Baik 2 Rusak Berat
39	tempat tidur	1	Baik
40	Televisi	4	3 Baik 1 Rusak Berat
41	Sound System	1	Baik
42	Timbangan Badan	1	Baik
43	Tangga Alumunium	1	Baik
44	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2	Baik
45	Alat Pemadam Portable	2	Baik
46	P.C Unit/ Komputer PC	26	25 Baik 1 Rusak Berat
47	Lap Top	9	8 Baik 1 Rusak Berat
48	Note Book	1	Baik
49	Scanner	8	Baik
50	Printer	22	Baik
51	UPS	2	Baik
52	Harddisk Eksternal	3	Baik
53	Server	1	Baik
54	Router	1	Rusak Berat
55	Switch Hub	4	3 Baik 1 Rusak Berat
56	Meja Kerja	27	26 Baik 1 Kurang Baik
57	Conector	4	3 Baik 1 Kurang baik
58	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	Baik
59	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	2	Baik
60	Proyektor + Attachment	1	Baik
61	Camera Electronic	1	Baik
62	Handy Talky	2	Baik
63	Facsimile	1	Baik
64	Wireless Amplifier	2	Baik
65	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	1	Baik
66	Penambahan daya listrik	1	Baik
67	Instalasi Pusat Pengatur Listrik Kapasitas Sedang	1	Baik
68	Jaringan Pembawa Lain-lain	1	Baik
69	Jaringan Telepon Di atas Tanah Kapasitas Sedang	1	Baik
70	Alat Ukur Lainnya / Thermo	1	Baik
71	Web cam	4	Baik
72	Mesin cetak ID Card pegawai	1	Baik



1.4.3 Permasalahan dan Isu Strategis BKPSDMD

Secara umum permasalahan yang dihadapi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang antara lain sebagai berikut :

1. Database kepegawaian belum sepenuhnya akurat;
2. Masih adanya beberapa pelayanan administrasi kepegawaian yang belum tepat waktu;
3. Masih terjadinya pelanggaran disiplin pegawai pada beberapa Perangkat Daerah;
4. Penetapan dalam jabatan belum sepenuhnya sesuai dengan kompetensi

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa yang akan datang. Isu strategis yang perlu ditangani dalam pelaksanaan Renstra Badan Kapegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas SDM Aparatur;
2. Penempatan pegawai secara lebih optimal sesuai kompetensi serta Analisa Beban Kerja dan Analisa Jabatan;
3. Peningkatan disiplin pegawai;
4. Digitalisasi Pelayanan administrasi kepegawaian;
5. Peningkatan akurasi data pegawai;
6. Peningkatan kinerja SDM Aparatur;
7. Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara (Flexibel Working Arrangement)

1.5. SISTEMATIKA PENYUSUNAN LAKIP TAHUN 2022

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini menyampaikan pencapaian kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2022. Capaian kinerja tahun anggaran 2022 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan suatu organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap kinerja ini akan memungkinkan mengidentifikasi faktor kelemahan dan kekurangan untuk perbaikan kinerja dimasa yang akan datang.

Sistematika penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang adalah sebagai berikut :



KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, permasalahan – permasalahan serta *strategic issued* yang dihadapi oleh organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini diuraikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Membandingkan antara target dan realisasi tahun ini, membandingkan capaian kinerja tahun ini dengan capaian kinerja tahun lalu, dan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam renstra, analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan, peningkatan/penurunan kinerja serta solusi yang dilakukan, analisis penggunaan sumber daya, analisis program kegiatan, dan realisasi anggaran.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN



BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 PERENCANAAN KINERJA

Sebagai langkah awal yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang adalah melakukan perencanaan strategis. Melalui pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis akan lebih menyelaraskan visi dan misi dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja.

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja dalam pelaksanaan urusan kepegawaian yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Pangkalpinang Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pangkalpinang tahun 2018-2023 sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan serta sebagai pedoman pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi periode 2018-2023.

2.1.1 Tujuan dan Sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang

Menelaah visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan OPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut.

Hasil identifikasi OPD tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan OPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ini juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan OPD. Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan- kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.



Visi Walikota dan Wakil Walikota terpilih yaitu :

"Mewujudkan Pangkalpinang sebagai Kota SENYUM"

(Sejahtera Nyaman Unggul Makmur)

Visi tersebut diatas terdiri dari 4 frase (bagian), yaitu Kota Pangkalpinang **Sejahtera, Nyaman, Unggul dan Makmur**.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang mengarah pada pencapaian visi ke 3 : *Mewujudkan Kota Pangkalpinang sebagai Kota "Unggul"*. Adapun misi RPJMD yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang adalah Misi ke III yaitu **"Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, menuju tercapainya Good Governance"** dengan **tujuan Meningkatkan Implementasi Reformasi Birokrasi** dan dengan **sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)**.

Tujuan merupakan penjabaran dari misi yang hendak dicapai dalam jangka waktu lima (5) tahun. Tujuan yang ditetapkan atas dasar pernyataan visi dan misi Kepala Daerah terpilih sehingga dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun kedepan. Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan memiliki indikator kinerja yang terukur.

Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang dalam kurun waktu tahun 2018-2023 yaitu :

"Meningkatkan Disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN)"



Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang dalam kurun waktu tahun 2018-2023 yaitu :

"Meningkatnya Penataan ASN Sesuai dengan Kompetensi"

2.1.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Sumber Daya Aparatur
2. Meningkatkan kompetensi aparatur dalam pemanfaatan aplikasi government.
3. Mengembangkan infrastruktur dan jaringan telekomunikasi sesuai dengan kebutuhan, dan pengintegrasian aplikasi e-government.
4. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi ASN melalui berbagai diklat dan pelatihan.
5. Melakukan penataan ASN sesuai dengan kompetensi dan melakukan peningkatan kualitas manajemen ASN melalui rencana kebutuhan riil ASN jangka menengah, rencana pengembangan kompetensi ASN dan penyusunan pola karir

Arah Kebijakan yang diambil oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang sebagai berikut :

1. Mengembangkan kompetensi Sumber Daya Aparatur dan dengan Optimalisasi database talent pool dalam penilaian kompetensi pada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator dalam penempatan pegawai
2. Peningkatan kompetensi dan profesionalitas Aparatur Sipil Negara dalam pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Optimalisasi penerapan e-goverment dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.



4. Menyelenggarakan diklat untuk meningkatkan keterampilan.
5. Penempatan pegawai sesuai dengan formasi sesuai dengan kebutuhan organisasi dan penyusunan pola karir dengan memperhatikan analisis jabatan dan analisis beban kerja.



Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Jangka Menengah					Kondisi Akhir RPJMD
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	Meningkatkan Implementasi Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah		Indeks Reformasi Birokrasi (Sub Komponen Penataan Sistem Manajemen SDM)	Nilai	59,07	60,15	61,50	62,50	-	-	-	-
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	75,87	76,44	76,80	77,20	-	-	-	-
	Meningkatkan Disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN)		Persentase ASN yang disiplin	Nilai	-	-	-	-	97,00	98,50	99,00	99,00
		Meningkatnya Penataan ASN Sesuai dengan Kompetensi	Persentase pejabat struktural yang sesuai dengan kompetensinya	%	-	-	-	-	78,00	79,00	80,00	80,00



2.2 Rencana Kinerja Tahun Anggaran 2022

Untuk melihat gambaran kinerja BKPSDMD Kota Pangkalpinang, maka perlu ditampilkan uraian kinerja tahun 2022 yaitu Indikator Kinerja Kunci (IKK) BKPSDMD, Indikator Kinerja Utama (IKU) BKPSDMD serta indikator kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Berikut diuraikan mengenai Rencana Kinerja BKPSDMD Kota Pangkalpinang Tahun 2022.

Sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melakukan urusan pemerintahan fungsi Penunjang Kepegawaian yaitu Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan. Adapun Indikator kinerjanya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.2
INDIKATOR KINERJA KUNCI
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
TAHUN 2022

No	Indikator Kinerja Kunci	Formulasi
1	Rasio pegawai Pendidikan tinggi dan menengah/dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga Kesehatan)	Jumlah pegawai Pendidikan Perguruan tinggi ke atas : jumlah pegawai dengan pendidikan SMA ke bawah x 100 %
2	Rasio pegawai fungsional	Jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan): seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) x 100 %
3	Rasio jabatan fungsional yang bersertifikat kompetensi	Jumlah pegawai fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi : seluruh jumlah pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) x 100 %



Selain Indikator berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai Indikator Kinerja Utama. Indikator Kinerja Utama (IKU) BKPSDMD merupakan Sasaran OPD yang terdapat dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023. IKU BKPSDMD Kota Pangkalpinang Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.3
INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
TAHUN 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Penataan ASN Sesuai dengan Standar Kompetensi	Persentase pejabat struktural yang sesuai dengan kompetensinya	79

Tabel 2.4
Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah

No	Sasaran	Strategi	Kebijakan	2021	2022	2023
1.	Meningkatnya Penataan ASN Sesuai dengan Standar Kompetensi	Melakukan penataan ASN sesuai dengan kompetensi kepada seluruh Aparatur Sipil Negara	Optimalisasi database talent pool. dalam Penilaian Kompetensi pada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator			
		Melakukan peningkatan kualitas manajemen ASN melalui rencana kebutuhan riil ASN jangka menengah, rencana pengembangan kompetensi ASN dan penyusunan pola karir	Perencanaan kebutuhan ASN dengan memiliki tata kelola manajemen kepegawaian yang baik, juga meningkatkan kompetensi dan profesionalitas Aparatur Sipil Negara			



			baik melalui pendidikan latihan formal, non formal ataupun dilakukan dengan menggunakan metode ceramah, tanya jawab atau diskusi, serta penugasan			
		Meningkatkan kedisiplinan dan profesionalitas kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan kebijakan pimpinan daerah dan pimpinan perangkat daerah.	Sistem absensi yang terintegrasi dengan sistem kepegawaian, pembayaran tunjangan kinerja akan didasarkan pada kinerja pegawai, Penilaian Prestasi Kerja Pegawai semuanya dinilai oleh atasan			

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2022

Pada tahun 2022, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah membuat Perjanjian Kinerja Tingkat Eselon II, Eselon III dan Sub Koordinator. Berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah dibuat maka ada beberapa indikator program/ kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah pada tahun 2022. Indikator tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini.



Tabel 2.5
PERJANJIAN KINERJA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
KOTA PANGKALPINANG TAHUN ANGGARAN 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
	Meningkatnya Penataan ASN	Persentase Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja tepat waktu	100%
		Jumlah dokumen perubahan DPA BKPSDMD yang tersusun	1 Dok
	Sesuai dengan Standar kompetensi	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Keuangan	100%
		Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	30 Org
		Persentase terpenuhinya Administrasi Kepegawalan	100%
		Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat sesuai tugas dan fungsi	5 org
		Persentase terpenuhinya administrasi Umum	100%
		Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	11 Jenis
		Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	12 Set
		Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia	4 Jenis
		Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	14 Set
		Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilakukan	35 kali
		Persentase terpenuhi Pengadaan Barang Milik Daerah	100%
		Jumlah Aset Tetap Lainnya yang disediakan	1 Unit
		Persentase Terpenuhinya Penyediaan Jasa	100%
		Jumlah aparatur internal BKPSDMD yang terlayani	46 Org
		Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki	26 Unit
		Jumlah aparatur internal BKPSDMD yang terlayani	46 Org
		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%
		Jumlah kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	1 Unit
		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	4 Unit
		Jumlah gedung kantor/bangunan lainnya yang dipelihara	1 Unit
		Persentase pelaksanaan pengadaan, pemberhentian dan pemberian informasi kepegawalan ASN	100%
		Jumlah ASN yang lulus sesuai dengan formasi yang diajukan	200 org
		Jumlah CASN yang diangkat menjadi ASN	387 org
		Jumlah SK pensiun yang diterbitkan	135 org
		Jumlah pelaksanaan perayaan HUT KORPRI	3 Event
		Jumlah data pelayanan kepegawalan yang dikelola dalam aplikasi SAPK dan e-smile	3000 Data
		Jumlah website yang dikelola dan dikembangkan	1 Website
		Jumlah data kepegawalan yang dikelola	500 org
		Persentase pelaksanaan mutasi dan promosi ASN	100%
		Jumlah PNS yang mengikuti seleksi mutasi dan seleksi jabatan pimpinan tinggi	25 org
		Jumlah SK pangkat ASN yang diterbitkan	600 org
		Jumlah pelaksanaan Pembinaan Karir PNS	11 kali
		Persentase pelaksanaan pengembangan kompetensi ASN	100%
		Jumlah ASN yang mengikuti Sosialisasi, ujian dinas dan tambahan masa kerja untuk peningkatan kapasitas kinerja ASN	30 org
		Jumlah ASN Pemkot Pangkalpinang yang menerima bantuan biaya tugas belajar	4 org
		Jumlah ASN yang diangkat dalam Jabatan Fungsional	30 org
		Persentase pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja ASN	100%
		Jumlah ASN yang akan dinilai (IP ASN) dan dievaluasi kinerja aparatur	3000 org
		Jumlah ASN yang menerima penghargaan	327 org
		Jumlah penyelesaian kasus ASN yang indisipliner	5 kasus
		Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis	100%
		Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan, uji kompetensi teknis umum dan diklat teknis dan fungsi	50 org



		Persentase ASN yang mengikuti sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	100%
		- Jumlah ASN dan CASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi, Pendidikan Pelatihan kepemimpinan dan prajabatan	196 org

Pada tahun 2022 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang melaksanakan 3 (tiga) program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 38 (tiga puluh delapan) sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 6.420.299.184 (Enam Miliar Empat Ratus Dua Puluh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Seratus Delapan Puluh Empat Rupiah).



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja

Akuntabilitas menggambarkan tingkat pencapaian kinerja sasaran ataupun tujuan dari penjabaran visi, misi dan strategi yang mengidentifikasi tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan. Sedangkan pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang terjadi dengan kinerja yang diharapkan atau dalam kata lain membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja.

Untuk mengukur rencana keberhasilan capaian kinerja tersebut, digunakan instrument *standart pengukuran ordinal* dengan skala pengukuran kinerja :

86 - 100 %	= Sangat Baik
71 - 85 %	= Baik
56 – 70%	= Kurang Baik
0 – 55 %	= Sangat Kurang Baik

Standar pengukuran kinerja tersebut digunakan sebagai dasar dalam menganalisa terhadap penilaian keberhasilan dan kegagalan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran dan kegiatan, maka dapat disampaikan nilai capaian masing-masing kinerja. Nilai capaian kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2022 dapat dilihat dari capaian sasaran dan capaian kegiatan. Adapun nilai capaian kinerja baik capaian sasaran maupun indikator kinerja adalah sebagai berikut :



3.1.1 Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci (IKK) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2022

Tabel 3.1
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KUNCI
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
TAHUN 2022

No	Indikator Kinerja Kunci	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi
1	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/ dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	100%	1396/296	100%
2	Rasio pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga Kesehatan)	7.05%	359/1692	100%
3	Rasio jabatan fungsional yang bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga Kesehatan)	100%	161/359	44.8%

1. Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/ dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)

Pada tahun 2022, rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/ dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) lebih dari 100 % dengan capaian 1396 orang CPNS/PNS dengan pendidikan tinggi dan menengah dan 296 orang CPNS/PNS dengan pendidikan SMA kebawah sehingga capaian tingkat realisasi mencapai 100%.

2. Rasio pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga Kesehatan)

Pada tahun 2022, rasio pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga Kesehatan) adalah 21.22 % dimana ada 359 orang PNS dengan jabatan fungsional dengan jumlah seluruh pegawai Pemerintah Kota Pangkalpinang sebanyak 1692 orang pegawai tidak termasuk guru dan tenaga Kesehatan.

3. Rasio jabatan fungsional yang bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga Kesehatan)

Pada tahun 2022 , rasio jabatan fungsional yang bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga Kesehatan) adalah 44.85 dimana ada 161 orang PNS dengan jabatan fungsional yang telah memiliki sertifikat kompetensi dari 359 orang PNS dengan jabatan fungsional.



No	Uraian	Jumlah	Satuan
1.	Jumlah seluruh pegawai Kota Pangkalpinang Tahun 2022	3282	Orang
2.	Jumlah PPPK Penyuluh Pertanian Kota Pangkalpinang	7	Orang
3.	Jumlah PPPK Guru Kota Pangkalpinang	236	Orang
4.	Jumlah Pegawai Tenaga Guru Kota Pangkalpinang	757	Orang
5.	Jumlah Pegawai Tenaga Kesehatan Kota Pangkalpinang	597	Orang
6.	Jumlah Pegawai Kota Pangkalpinang Tahun 2022 (tidak termasuk Guru, Nakes, PPPK guru dan Nakes)	1692	Orang
7.	Jumlah pegawai dengan pendidikan tinggi keatas (tidak termasuk guru dan Nakes)	1396	Orang
8.	Jumlah pegawai dengan pendidikan SMA kebawah (tidak termasuk guru dan Nakes)	296	Orang
9.	Jumlah pegawai fungsional Kota Pangkalpinang Tahun 2022	359	Orang
10.	Jumlah pegawai fungsional bersertifikat kompetensi Kota Pangkalpinang Tahun 2022	161	Orang
11.	Jumlah pegawai fungsional tidak bersertifikat kompetensi	198	Orang
12.	Jumlah seluruh pegawai Kota Pangkalpinang Tahun 2022 (tidak termasuk PPPK, Guru dan tenaga kesehatan)	1685	Orang

3.1.2 Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2022

Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang merupakan Sasaran OPD yang terdapat dalam Dokumen Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023. Pada Tahun 2022, yang menjadi IKU BKPSDMD adalah Meningkatnya Penataan ASN sesuai dengan Standar Kompetensi.

Pemerintah Daerah harus memiliki kemampuan dalam Penataan ASN sesuai dengan Standar Kompetensi, guna optimalisasi peningkatan kinerja dan kualitas kompetensi ASN. Penataan ASN tersebut dilakukan mulai dari melakukan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (ABK), menghitung jumlah pegawai tetap, hingga penataan pegawai dengan mengacu pada kuantitas, kualitas, komposisi, dan distribusi pegawai. Penataan pegawai tersebut dilakukan untuk menempatkan SDM di tempat yang tepat sesuai dengan kebutuhan, agar instansi dapat berjalan dengan optimal dan mewujudkan visi misinya.



Peningkatan kualitas manajemen kinerja merupakan hal yang krusial di instansi, karena sangat berpengaruh pada peningkatan kualitas reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan. Perencanaan kinerja membutuhkan indikator kinerja dan sasaran kinerja pegawai yang tajam dan berkualitas. Selain itu juga harus memperhatikan kinerja individu yang harus mengacu pada kinerja utama organisasi. Kualitas perencanaan kinerja yang rendah akan sangat berdampak pada hasil prestasi kerja.

Badan Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, pejabat administrator perlu menggerakkan setiap ASN di daerah supaya mempunyai tanggung jawab untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antar daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Mengacu pada Undang-Undang ASN, bahwa tuntutan profesionalitas ASN yakni memenuhi persyaratan kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural. Lebih lanjut diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa selain memenuhi 3 kompetensi tersebut di atas, juga pejabat ASN yang menduduki jabatan Kepala Perangkat Daerah yang berlaku secara mutatis mutandis terhadap pegawai ASN yang menduduki jabatan Administrator juga harus memiliki Kompetensi Pemerintahan yang dibuktikan dengan Sertifikasi. Parameter produktifitas kerja pegawai ASN adalah kompetensi yang dibangun atas dasar pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang bisa diukur dan ditelusur.

Upaya meningkatkan kompetensi dapat dilakukan melalui berbagai cara, antara lain pendidikan, pelatihan atau pengembangan kompetensi, bimbingan teknis yang dilakukan secara formal dan dapat juga melalui belajar mandiri untuk mencapai tingkat kompetensi yang lebih tinggi sebagai ASN yang profesional sehingga dapat menghasilkan kinerja optimal sesuai kebutuhan organisasi.

Dengan adanya perubahan kebijakan pemerintahan daerah dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam aspek pembinaan dan pengawasan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, maka berbagai pedoman juga harus dihadirkan, diantaranya tentang Kompetensi Pemerintahan.

Sertifikasi kompetensi, adalah proses pemberian pengakuan kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi yang mengacu pada standar kompetensi



kerja khusus, atau standar kompetensi kerja nasional atau internasional. Sertifikasi kompetensi ini akan dilaksanakan oleh LSP-PDN berdasarkan standar kompetensi pemerintahan yang disesuaikan dengan substansi tugas administrator yang diamanatkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 yang ditindaklanjuti dengan Permendagri 108 Tahun 2017. Mengacu pada kebijakan tersebut, Para Assesor dari Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah menyusun materi uji kompetensi dengan metode bukti langsung, tidak langsung dan bukti tambahan untuk membuktikan kompetensi pemerintahan Saudara-saudara sebelum direkomendasikan kompeten dalam jabatan administrator. Standar kompetensi yang akan diujikan meliputi pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang meliputi kebijakan desentralisasi, hubungan pemerintah pusat dengan daerah, pemerintahan umum, pengelolaan keuangan daerah, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, hubungan pemerintah daerah dengan DPRD dan etika pemerintahan.

Setelah dilakukan pengukuran yang difasilitasi oleh Badan Kepegawaian Negara, maka untuk tahun 2022 didapatkan hasil seperti tabel berikut.

Tabel 3.2
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
TAHUN 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi
1	Meningkatnya Penataan ASN Sesuai dengan Standar Kompetensi	Persentase pejabat struktural yang sesuai dengan kompetensinya	79.00%	84.60%	100%



Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu:

Tahun 2019 - 2020

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
		2019	2019	Capaian	2020	2020	Capaian
Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Indeks Profesionalitas ASN	76.80%	63.46%	82.63%	77.20%	53.00%	68.65%

Tahun 2020 - 2021

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
		2021	2021	Capaian	2022	2022	Capaian
Meningkatnya Penataan ASN Sesuai dengan Standar Kompetensi	Persentase pejabat struktural yang sesuai dengan kompetensinya	78.00%	57.25%	73.40%	79.00%	84.60%	100%

Pada tahun 2022, target pejabat struktural yang sesuai dengan kompetensinya adalah dengan nilai 79.00% terealisasi dengan nilai 84.60% dengan tingkat realisasi 100%. Tingkat realisasi naik sekitar 27.35% dari tahun 2021 dimana target persentase pejabat struktural yang sesuai dengan kompetensinya tahun 2021 adalah 78.00 hanya terealisasi sebesar 57.25% dengan tingkat realisasi 73.40 %. Penilaian dilakukan melalui IP ASN dengan melihat 4 variabel yang diukur yaitu :

1. Kualifikasi Pendidikan

Dilihat dari riwayat pendidikan formal terakhir baik yang sudah dilakukan penyesuaian ataupun belum dengan bobot penilaian 25%.

2. Kompetensi

Dilihat dari riwayat pengembangan kompetensi yaitu diklat struktural, diklat fungsional dan diklat teknis bagi jabatan struktural/JFT/JFU minimal 20 JP yang diikuti dalam 1 (satu) tahun terakhir dengan bobot penilaian 40%.



3. Kinerja

Dilihat dari data hasil penilaian kinerja yang diperoleh dalam 1 (satu) tahun terakhir dengan bobot penilaian 30%.

4. Disiplin

Dilihat dari riwayat hukuman disiplin yang diterima dalam 5 (lima) tahun terakhir dengan bobot 5%.

Dalam variable pengukuran kompetensi manajerial persentase pejabat struktural sesuai dengan kompetensinya antara lain:

1. Analisa Strategis

Mengidentifikasi, menguraikan, menghubungkan masalah-masalah utama yang dihadapi dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang organisasi.

2. Fleksibilitas Berpikir

Menggunakan berbagai sudut pandang dalam menghadapi berbagai situasi.

3. Inovasi

Membuat solusi alternatif dalam situasi kerja dengan mencoba cara yang berbeda dan orisinal untuk mengatasi masalah.

4. Komunikasi Lisan

Menyampaikan pendapat/ide/informasi secara lisan dengan menggunakan kata/kalimat yang mudah dimengerti orang, baik perorangan maupun dalam kelompok.

5. Komunikasi Tertulis

Menyampaikan pendapat/ide/informasi pemikiran secara jelas dengan menggunakan tulisan dan tata Bahasa dengan baik dan benar.

6. Kegigihan

Bertahan pada rencana tindakan dengan aktivitas dan produktivitas yang tinggi serta tetap fokus sampai sasaran yang diinginkan tercapai atau tidak mungkin lagi dapat dicapai.

7. Mengambil Resiko

Keberanian mengambil tindakan untuk mendapat manfaat dengan telah mempertimbangkan kemungkinan kegagalan dari hasil yang buruk.

8. Pengambilan Keputusan Strategis

Membuat kebijakan dan tindakan yang cepat dan tepat sesuai kepentingan organisasi dengan mempertimbangkan kepentingan semua pihak dan dampak jangka panjang.



9. Perencanaan dan Pengorganisasian

Menyusun rencana kerja dan tindakan dengan mengoptimalkan sumberdaya yang ada untuk pencapaian tujuan organisasi.

10. Berorientasi pada Pelayanan

Memahami dan memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan pelanggan di lingkup internal maupun eksternal organisasi agar tercipta kepuasan pelanggan.

11. Negosiasi

Meyakinkan orang lain melalui berbagai alternatif cara untuk mendapatkan kesepakatan Bersama.

12. Membangun Hubungan Kerjasama Strategis

Membangun dan menaembangkan hubungan kerjasama dengan melibatkan pihak-pihak terkait dan berdampak jangka panjang pada kelompok, departemen dan organisasi.

13. Memfasilitasi Perubahan

Melakukan upaya perubahan organisasi ke arah yang lebih baik dan dapat diterima oleh orang lain serta bertanggung jawab atas implementasi dari perubahan tersebut.

14. Kepemimpinan Strategis

Menciptakan kondisi masa depan organisasi dengan mempengaruhi, menggerakkan orang lain dan mengelola sumber daya yang dimiliki.

3.1.3 Capaian Kinerja Program/ Kegiatan Tahun 2022 pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang

TABEL 3.3
CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
KOTA PANGKALPINANG TAHUN ANGGARAN 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi
1	2	3	4	5	6
	Meningkatnya	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	100%	100%	100%
	Penataan ASN	Jumlah dokumen RENSTRA/ RENJA BKPSDMD yang tersusun	3 Dok	3 Dok	100%
	Sesuai dengan	Jumlah dokumen DPA BKPSDMD yang tersusun	1 Dok	1 Dok	100%
	Standar	Jumlah dokumen perubahan DPA BKPSDMD yang tersusun	1 Dok	1 Dok	100%
	Kompetensi	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja (LKPJ, LKPJ AMJ, LPPD) yang tersusun	2 Dok	2 Dok	100%
		Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Keuangan	100%	94%	98%



	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	30 org	28 org	93%
	Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 laporan	100%
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran SKPD	1 laporan	1 laporan	100%
	Persentase terpenuhinya Administrasi Kepegawaian	100%	80%	80%
	Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat sesuai tugas dan fungsi	5 orang	4 orang	80%
	Persentase terpenuhinya administrasi Umum	100%	92%	83%
	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	11 jenis	11 jenis	100%
	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	12 set	8 set	67%
	Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia	4 jenis	2 jenis	50%
	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	14 set	14 set	100%
	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilakukan	35 kali	35 kali	100%
	Persentase terpenuhi Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	100%	100%
	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang disediakan	1 unit	8 unit	800%
	Persentase Terpenuhinya Penyediaan Jasa	100%	97%	97%
	Jumlah aparatur internal BKPSDMD yang terlayani	46 org	44 org	96%
	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki	26 unit	26 unit	100%
	Jumlah aparatur internal BKPSDMD yang terlayani	46 org	44 org	96%
	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%
	Jumlah kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	1 unit	1 unit	100%
	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	4 unit	4 unit	100%
	Jumlah gedung kantor/bangunan lainnya yang dipelihara	1 unit	1 unit	100%
	Persentase pelaksanaan pengadaan, pemberhentian dan pemberian informasi kepegawaian ASN	100%	100%	97%
	Jumlah ASN yang lulus sesuai dengan formasi yang diajukan	200 org	130 org	65%
	Jumlah CASN yang diangkat menjadi ASN	387 org	387 org	100 %
	Jumlah SK pensiun yang diterbitkan	135 orang	142 orang	105%
	Jumlah pelaksanaan perayaan HUT KORPRI	3 event	3 event	100%
	Jumlah data pelayanan kepegawaian yang dikelola dalam aplikasi SAPK dan e-smile	3000 data	3275 data	109%
	Jumlah website yang dikelola dan dikembangkan	1 website	1website	100%
	Jumlah data kepegawaian yang dikelola	500 orang	500 orang	100%
	Persentase pelaksanaan mutasi dan promosi ASN	100%	100%	100%
	Jumlah PNS yang mengikuti seleksi mutasi dan seleksi jabatan pimpinan tinggi	25 org	53 org	212%
	Jumlah SK pangkat ASN yang diterbitkan	600 orang	675 orang	113%
	Jumlah pelaksanaan Pembinaan Karir PNS	11 kali	7 kali	64%
	Persentase pelaksanaan pengembangan kompetensi ASN	100%	100%	100%
	Jumlah ASN yang mengikuti Sosialisasi, ujian dinas dan tambahan masa kerja untuk peningkatan kapasitas kinerja ASN	30 orang	30 orang	100%
	Jumlah ASN Pemkot Pangkalpinang yang menerima bantuan biaya tugas belajar	4 orang	4 orang	100%
	Jumlah ASN yang diangkat dalam Jabatan Fungsional	30 orang	148 orang	493%



	Persentase pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja ASN	100%	91%	100%
	Jumlah ASN yang akan dinilai (IP ASN) dan dievaluasi kinerja aparatur	3050 orang	2784orang	91%
	Jumlah ASN yang menerima penghargaan	327orang	299 orang	91%
	Jumlah penyelesaian kasus ASN yang indiscipliner	5 kasus	9 kasus	180%
	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis	100%	100%	100%
	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan, uji kompetensi teknis umum dan diklat teknis dan fungsi	50 orang	74 orang	148%
	Persentase ASN yang mengikuti sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	100%	100%	100%
	Jumlah ASN dan CASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi, Pendidikan Pelatihan kepemimpinan dan prajabatan	196 orang	196 orang	100%

Pada tahun 2022, ada 3 (Tiga) indikator kinerja program, 13 (tiga belas) indikator kinerja kegiatan dan ada 33 (tiga puluh tiga) indikator kinerja sub kegiatan. Indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut yaitu :

1. Persentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja tepat waktu

Persentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja tepat waktu pada tahun 2022 adalah 100%. Hasil ini merupakan perhitungan dari total jumlah kinerja kegiatan yang terdiri dari 4 point indikator kinerja yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi
1	2	3	4
Persentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja tepat waktu	100%	100%	100%
- Jumlah dokumen RENSTRA/ RENJA BKPSDMD yang tersusun	3 Dok	3 Dok	100%
- Jumlah dokumen DPA BKPSDMD yang tersusun	1 Dok	1 Dok	100%
- Jumlah dokumen Perubahan DPA BKPSDMD yang tersusun	1 Dok	1 Dok	100%
- Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja (LKPJ, LKPJ AMJ, LPPD) yang tersusun	2 Dok	2 Dok	100%

Dari tabel diatas realisasi persentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja tepat waktu Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah tahun 2022 berdasarkan 4 point indikator kinerja yaitu :

- Indikator kinerja jumlah dokumen RENSTRA/ RENJA BKPSDMD yang tersusun dari target 3 dokumen yang direncanakan terealisasi 3 dokumen yaitu dokumen RENSTRA perubahan 2018-2023, dokumen RENJA 2022 dan dokumen RENJA perubahan 2022 dengan tingkat realisasi 100%.



- Indikator jumlah dokumen DPA BKPSDMD yang tersusun dengan target 1 dokumen DPA BKPSDMD yang tersusun terealisasi 1 dokumen DPA yang tersusun dengan tingkat realisasi 100%.
- Indikator jumlah dokumen perubahan DPA BKPSDMD yang tersusun dengan target 1 dokumen perubahan DPA BKPSDMD yang tersusun terealisasi 1 dokumen perubahan DPA sehingga tingkat realisasi 100%.
- Indikator jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja (LKPJ, LKPJ AMJ, LPPD) yang tersusun dengan target 2 dokumen laporan yang tersusun terealisasi 2 dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun yaitu laporan LKPJ/LPPD dan laporan LAKIP sehingga capaian tingkat realisasi 100%.

2. Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi keuangan

Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi keuangan pada tahun 2022 adalah 98%. Hasil ini merupakan perhitungan dari total jumlah kinerja kegiatan yang terdiri dari 3 point indikator kinerja yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi
1	2	3	4
Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi keuangan	100%	94%	98%
- Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	30 org	28 org	93%
- Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 laporan	1 laporan	100%
- Jumlah laporan keuangan bulanan/semesteran SKPD	1 laporan	1 laporan	100%

Dari tabel diatas terlihat bahwa persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi keuangan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah pada tahun 2022 berdasarkan 3 point indikator kinerja yaitu :

- Indikator kinerja jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan dengan realisasi 30 orang ASN yang menerima gaji dan tunjangan tingkat realisasi mencapai 98% dikarenakan di bulan Desember 2022 jumlah ASN di BKPSDMD hanya berjumlah 28 orang pegawai yang terdiri dari 22 orang ASN dan 6 orang CASN dari target 30 orang ASN.
- Indikator kinerja jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD terealisasi 1 laporan keuangan akhir tahun SKPD dengan tingkat realisasi 100%.
- Indikator kinerja jumlah laporan keuangan bulanan/semesteran SKPD terealisasi 1 laporan keuangan bulanan/semesteran SKPD dengan tingkat realisasi 100%



3. Persentase terpenuhinya administrasi kepegawaian

Persentase terpenuhinya administrasi kepegawaian adalah 80%. Hasil ini merupakan perhitungan dari total jumlah kinerja kegiatan yang terdiri dari 1 point indikator kinerja yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi
1	2	3	4
Persentase terpenuhinya administrasi kepegawaian	100%	80%	80%
- Jumlah pegawai yang mengikuti diklat sesuai tugas dan fungsi	5 orang	4 orang	80%

Dari tabel diatas terlihat bahwa persentase terpenuhinya administrasi kepegawaian berdasarkan 2 point indikator kinerja yaitu :

- Indikator kinerja jumlah pegawai yang mengikuti diklat sesuai tugas dan fungsi dengan target 5 orang hanya terealisasi 4 orang dikarenakan untuk besaran biaya kontribusi yang dikeluarkan utk mengikuti pendidikan dan pelatihan barang dan jasa yaitu sebesar Rp.2.275.000/orang sehingga anggaran tersebut dapat diikuti oleh 4 orang pegawai dengan capaian tingkat realisasi 80%.

4. Persentase terpenuhinya administrasi umum

Persentase terpenuhinya administrasi umum adalah 83%. Hasil ini merupakan perhitungan dari total jumlah kinerja kegiatan yang terdiri dari 5 point indikator kinerja yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi
1	2	3	4
Persentase terpenuhinya administrasi umum	100%	92%	83%
- Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	11 jenis	11 jenis	100%
- Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	12 set	8 set	67%
- Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	4 jenis	2 jenis	50%
- Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	14 set	14 set	100%
- Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilakukan	35 kali	35 kali	100%

Dari tabel diatas terlihat persentase terpenuhinya administrasi umum adalah 83%. Dengan rincian berdasarkan:

- Indikator kinerja jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang



disediakan dengan target 11 jenis sesuai target di dokumen Rencana Strategis dengan capaian realisasi 11 jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dengan tingkat realisasi 100%.

- Indikator kinerja jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan dengan target 12 set sesuai target di dokumen Rencana Strategis dikarenakan adanya refocusing anggaran sehingga hanya bisa dianggarkan untuk 12 set peralatan rumah tangga dan hanya dapat direalisasikan 8 set yang terdiri dari 2 set pengisian tabung kebakaran dan 6 set pengisian tabung gas dengan tingkat realisasi 67%.
- Indikator kinerja jumlah bahan logistik kantor yang disediakan dengan target 4 jenis bahan logistik kantor terealisasi 2 jenis bahan logistik kantor terdiri dari belanja ATK dan belanja makanan minuman jamuan tamu sehingga capaian tingkat realisasi hanya sebesar 50%.
- Indikator kinerja barang cetakan dan penggandaan yang disediakan dengan target 14 set dengan terealisasi 14 set barang cetakan dan penggandaan dengan tingkat realisasi 100% dimana semua rekening belanja barang cetakan dan penggandaan dianggarkan 1 pintu pada sub kegiatan di sekretariat.
- Indikator kinerja jumlah koordinasi dan konsultasi dilakukan dengan target 35 kali pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan realisasi 35 kali dengan tingkat realisasi 100%. Koordinasi dan konsultasi dilakukan ke kabupaten dan ke luar kota/daerah.

5. Persentase terpenuhi pengadaan barang milik daerah.

Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah lebih dari 100%. Hasil ini merupakan perhitungan dari total jumlah kinerja sub kegiatan yang terdiri dari 1 point indikator kinerja yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi
1	2	3	4
Persentase terpenuhi pengadaan barang milik daerah	100%	100%	100%
- Jumlah aset tetap lainnya yang disediakan	1 unit	8 unit	800%

Dari tabel diatas terlihat persentase terpenuhi pengadaan barang milik daerah adalah lebih dari 100%. Dengan rincian berdasarkan:

- Indikator kinerja jumlah aset tetap lainnya yang disediakan dengan target 1 jenis sesuai target di dokumen Rencana Strategis dikarenakan adanya kebutuhan yang mendesak seperti kurangnya peralatan dan perlengkapan komputer dikarenakan adanya penerimaan 6 orang



CASN di Tahun 2022 dan untuk mendukung kinerja pegawai dan fasilitas gedung kantor sehingga realisasi menjadi 8 jenis aset tetap lainnya dengan capaian tingkat realisasi lebih dari 100%.

6. Persentase terpenuhinya penyediaan jasa

Persentase terpenuhinya penyediaan jasa adalah 97%. Hasil ini merupakan perhitungan dari total jumlah kinerja sub kegiatan yang terdiri dari 3 point indikator kinerja yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi
1	2	3	4
Persentase terpenuhinya penyediaan jasa	100%	97%	97%
- Jumlah aparatur internal BKPSDMD yang terlayani	46 org	44 org	96%
- Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki	26 unit	26 unit	100%
- Jumlah aparatur internal BKPSDMD yang terlayani	46 org	44 org	96%

Dari tabel diatas terlihat bahwa total terpenuhinya penyediaan jasa adalah 97 %. Dengan rincian berdasarkan:

- Indikator kinerja jumlah aparatur internal BKPSDMD yang terlayani pada sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan target 46 orang aparatur internal terealisasi hanya 44 orang aparatur internal sesuai jumlah pegawai BKPSDMD 28 orang ASN dan 16 orang tenaga PHL dengan capaian tingkat realisasi 96%.
- Indikator kinerja jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki dengan target 26 unit terealisasi 26 unit peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki di Tahun 2022 sesuai dengan kebutuhan dengan tingkat realisasi 100%.
- Indikator kinerja jumlah aparatur internal BKPSDMD yang terlayani pada sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor terealisasi hanya 46 orang aparatur internal sesuai jumlah pegawai BKPSDMD 28 orang ASN/CASN dan 16 orang tenaga PHL dengan capaian tingkat realisasi 96%.

7. Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah

Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah adalah 100%. Hasil ini merupakan perhitungan dari total jumlah kinerja sub kegiatan yang terdiri dari 3 point indikator kinerja yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.



Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi
1	2	3	4
Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%
- Jumlah kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	1 unit	1 unit	100%
- Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	4 unit	4 unit	100%
- Jumlah Gedung kantor/bangunan lainnya yang dipelihara	1 unit	1 unit	100%

Dari tabel diatas terlihat bahwa persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah adalah 100 %. Dengan rincian berdasarkan:

- Indikator kinerja jumlah kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dengan target 1 unit terealisasi 1 unit mobil eselon II/ Kepala Badan dengan capaian tingkat realisasi 100%.
- Indikator kinerja jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dengan target 4 unit terealisasi 4 unit sesuai dengan jumlah mobil kendaraan operasional yang ada dengan capaian tingkat realisasi 100%.
- Indikator kinerja jumlah gedung kantor/bangunan lainnya yang dipelihara dengan target 1 unit terealisasi 1 unit untuk pembayaran gaji penjaga malam selama 12 bulan dengan capaian tingkat realisasi 100%.

8. Persentase pelaksanaan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian adalah 97%. Hasil ini merupakan perhitungan dari total jumlah kinerja kegiatan yang terdiri dari 7 point indikator kinerja yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi
1	2	3	4
Persentase pelaksanaan pengadaan, pemberhentian dan pemberian informasi kepegawaian ASN	100%	100%	97%
- Jumlah ASN yang lulus sesuai dengan formasi yang diajukan	200 org	130 org	65%
- Jumlah CASN yang diangkat menjadi ASN	387 org	387 org	100%
- Jumlah SK pensiun yang diterbitkan	135 org	142 org	105%
- Jumlah pelaksanaan perayaan HUT KORPRI	3 event	3 event	100%
- Jumlah data pelayanan kepegawaian yang dikelola dalam aplikasi SAPK dan e-smile	3000 data	3275 data	109%
- Jumlah website yang dikelola dan dikembangkan	1 website	1website	100%



- Jumlah data kepegawaian yang dikelola	500 orang	500 orang	100%
---	-----------	-----------	------

Dari tabel diatas didapatlah persentase pelaksanaan pengadaan, pemberhentian dan pemberian informasi kepegawaian ASN adalah 97%. Dengan rincian sebagai berikut :

- Indikator kinerja jumlah ASN yang lulus sesuai dengan formasi yang diajukan dengan target 200 orang terealisasi 130 orang terdiri dari 12 orang tenaga kesehatan dan 118 orang formasi tenaga guru sehingga capaian tingkat realisasi 65%.
- Indikator kinerja jumlah CASN yang diangkat menjadi ASN dengan target 387 orang terealisasi 387 orang terdiri dari 118 orang tenaga PPPK guru tahap I, 118 orang tenaga PPK guru tahap 2 dan 151 orang CASN yang diangkat menjadi ASN sehingga capaian tingkat realisasi mencapai 100%.
- Indikator kinerja jumlah SK pensiun yang diterbitkan dengan target 135 orang ASN terealisasi 142 orang ASN yang memasuki masa pensiun di Tahun 2022 sehingga capaian tingkat realisasi lebih dari 100%.
- Indikator kinerja jumlah pelaksanaan perayaan HUT KORPRI target 3 event dalam pelaksanaan HUT KORPRI di Tahun 2022, dimana ada event pelaksanaan perlombaan, jalan santai dan upacara pelaksanaan HUT KORPRI 2022 sehingga capaian tingkat realisasi 100%.
- Indikator kinerja jumlah data pelayanan kepegawaian yang dikelola dalam aplikasi SAPK dan e-smile dengan target 3000 data pegawai terealisasi 3275 data pegawai yang dikelola selama Tahun 2022 dengan capaian tingkat realisasi lebih dari 100%.
- Indikator kinerja jumlah website yang dikelola dan dikembangkan dengan target 1 website terealisasi 1 website yang dimiliki BKPSDMD Kota Pangkalpinang dengan capaian tingkat realisasi 100%.
- Indikator kinerja jumlah data kepegawaian yang dikelola dengan target 500 orang data pegawai terealisasi 500 orang data pegawai yang dikelola selama Tahun 2022 dengan capaian tingkat realisasi 100%.

9. Persentase pelaksanaan mutasi dan promosi ASN adalah 100%. Hasil ini merupakan perhitungan dari total jumlah kinerja kegiatan yang terdiri dari 3 point indikator kinerja yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.



Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi
1	2	3	4
Persentase pelaksanaan mutasi dan promosi ASN	100%	100%	100%
- Jumlah PNS yang mengikuti seleksi mutasi dan seleksi jabatan pimpinan tinggi	25 org	53 org	221%
- Jumlah SK pangkat ASN yang diterbitkan	600 orang	675 orang	113%
- Jumlah pelaksanaan pembinaan karir PNS	11 kali	7 kali	64%

Dari tabel diatas didapatkan persentase mutasi dan promosi ASN adalah 100%. Dengan rincian sebagai berikut :

- Indikator kinerja jumlah PNS yang mengikuti seleksi mutasi dan seleksi jabatan pimpinan tinggi dengan target 25 orang PNS terealisasi 53 orang PNS yang terdiri dari 29 orang yang mengikuti seleksi jabatan pimpinan tinggi (Dinsos 5 org, Dinas Perkim 3 org, Dinas Pariwisata 6 org, Dinas PPPAKB 8 org, Dinas KP 3 org dan BKPSDMD 3 org). Jumlah yang mengikuti seleksi mutasi masuk sebanyak 4 orang PNS dan yang mengikuti seleksi keluar sebanyak 20 orang PNS sehingga capaian tingkat realisasi lebih dari 100%.
- Indikator kinerja jumlah SK pangkat ASN yang diterbitkan dengan target 600 orang ASN yang mengusulkan kenaikan pangkat di Tahun 2022 terealisasi 675 orang ASN yang mengusulkan kenaikan pangkat dimana ada 414 orang ASN yang mengusulkan kenaikan pangkat di periode April 2022 dan 261 orang ASN yang mengusulkan kenaikan pangkat di periode Oktober 2022 sehingga capaian tingkat realisasi lebih dari 100%.
- Indikator kinerja jumlah pelaksanaan pembinaan karir PNS di Tahun 2022 dengan target 11 kali pelaksanaan pembinaan karir PNS terealisasi 7 kali pelaksanaan pembinaan karir PNS selama Tahun 2022 sehingga capaian tingkat realisasi hanya mencapai 64%.

10. Persentase pelaksanaan pengembangan kompetensi ASN adalah 100%. Hasil ini merupakan perhitungan dari total jumlah kinerja kegiatan yang terdiri dari 3 point indikator kinerja yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi
3	4	5	6
Persentase pelaksanaan pengembangan kompetensi ASN	100%	100%	100%
- Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi, ujian dinas dan tambahan masa kerja untuk peningkatan kapasitas kinerja ASN	30 orang	30 orang	100%



- Jumlah ASN Pemerintah Kota Pangkalpinang yang menerima bantuan biaya tugas belajar	4 orang	5 orang	125%
- Jumlah ASN yang diangkat dalam jabatan fungsional	30 orang	148 orang	493%

Dari tabel diatas terlihat bahwa total target upaya pelaksanaan pengembangan kompetensi ASN didapatkan persentase terpenuhinya upaya pembinaan dan pengembangan aparatur adalah sebesar 100%.

- Indikator kinerja jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi, ujian dinas dan tambahan masa kerja untuk peningkatan kapasitas kinerja ASN dengan target 30 orang terealisasi 30 orang ASN yang mengikuti tambahan masa kerja untuk peningkatan kapasitas kinerja ASN sehingga capaian tingkat realisasi 100%.
- Indikator kinerja jumlah ASN Pemerintah Kota Pangkalpinang yang menerima bantuan biaya tugas belajar dengan target 4 orang terealisasi 5 orang. Ada 4 orang ASN yang mengajukan proposal bantuan biaya tugas belajar S1 dan 1 orang ASN yang mengajukan bantuan biaya tugas belajar S2 sehingga capaian tingkat realisasi lebih dari 100%.
- Indikator kinerja jumlah ASN yang diangkat dalam jabatan fungsional di Tahun 2022 dengan target 30 orang ASN terealisasi 148 orang ASN yang memenuhi kriteria diangkat/naik jabatan dalam jenjang jabatan fungsional sehingga capaian tingkat realisasi lebih dari 100%.

11. Persentase pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja ASN adalah 100%. Hasil ini merupakan perhitungan dari total jumlah kinerja kegiatan yang terdiri dari 3 point indikator kinerja yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi
3	4	5	6
Persentase pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja ASN	100%	91%	100%
- Jumlah ASN yang akan dinilai (IP ASN) dan dievaluasi kinerja aparatur	3050 orang	2784 orang	91%
- Jumlah ASN yang menerima penghargaan	327 orang	299 orang	91%
- Jumlah penyelesaian kasus ASN yang indisipliner	5 kasus	9 kasus	180%

- Indikator kinerja jumlah ASN yang akan dinilai (IP ASN) dan dievaluasi kinerja aparatur target awal 3050 orang terealisasi hanya 2784 orang ASN yang akan dinilai dan dievaluasi kinerjanya tidak termasuk CASN dan PPPK sehingga capaian tingkat realisasi hanya 91%.
- Indikator kinerja jumlah ASN yang menerima penghargaan dengan target 327 orang ASN dari



353 orang ASN yang diusulkan pada Tahun 2021 untuk menerima penghargaan satya lencana terealisasi 299 orang ASN di Tahun 2022 yang menerima penghargaan Satya lencana sehingga capaian tingkat realisasi 100%.

- Indikator kinerja jumlah penyelesaian kasus ASN indisipliner selama Tahun 2022 terealisasi 9 kasus pelanggaran ASN yang indisipliner yang dapat diselesaikan sehingga capaian tingkat realisasi lebih dari 100%.

12. Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis adalah 100%. Hasil ini merupakan perhitungan dari total jumlah kinerja kegiatan yang terdiri dari 1 point indikator kinerja yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi
3	4	5	6
Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis	100%	100%	100%
- Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan, uji kompetensi teknis umum dan diklat tugas dan fungsi	50 orang	74 orang	100%

- Indikator kinerja jumlah ASN yang mengikuti pengembangan, uji kompetensi teknis umum dan diklat tugas dan fungsi dengan target awal 50 orang terealisasi 74 orang ASN yang terdiri dari 60 orang mengikuti uji kompetensi teknis umum, 9 orang mengikuti diklat pengadaan barang dan jasa level 1 berserta ujiannya dan 5 orang ASN mengikuti ujian pengadaan barang dan jasa level 1 sehingga capaian tingkat realisasi lebih dari 100%.

13. Persentase ASN yang mengikuti sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional adalah 100%. Hasil ini merupakan perhitungan dari total jumlah kinerja kegiatan yang terdiri dari 1 point indikator kinerja yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi
3	4	5	6
Persentase ASN yang mengikuti sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	100%	100%	100%
- Jumlah ASN dan CASN yang mengikuti pengembangan kompetensi, pendidikan pelatihan kepemimpinan dan prajabatan	196 orang	196 orang	100%

Dari tabel diatas terlihat bahwa total ASN yang mengikuti sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional sebanyak 196 orang ASN terdiri dari 193 orang CASN yang



mengikuti prajabatan dan 3 orang ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi dan pendidikan pelatihan kepemimpinan sehingga didapatkan persentase terpenuhinya upaya pembinaan dan pengembangan aparatur adalah 100%.



3.2 Perbandingan Capaian Kinerja sampai dengan Tahun 2021

1. Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Tabel 3.4
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Kunci
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang
Tahun 2015-2019

No	Indikator Kinerja (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2013)	Capaian Kinerja																		SKPD Penanggung jawab
			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018			Tahun 2019			Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD			
			target	realisasi	%	target	realisasi	%	target	realisasi	%	target	realisasi	%	target	realisasi	%	target	realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN																				
1.	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	-	0.34	0.26	76.92	0.27	0.05	20.00	0.35	0.57	163.64	0.17	0.13	76.47	2.00	1.47	73.5	0.17	0.13	76.47	
2.	Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	49.12	50.07	49.80	99.46	55.78	54.15	97.07	54.15	54.15	100	56.87	54.69	96.17	61.50	35.68	58.02	56.87	54.69	96.17	
3.	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	27	29	29	100	29	29	100	29	28	100	29	28	96.55	29	23	71.88	29	28	96.55	



4.	jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	124	136	132	97,06	136	125	91,91	118	117	100	116	108	93,10	116	113	97,41	116	108	93,10	
5.	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	2104	2063	2063	100	2032	2032	100	1593	1593	100	1553	1558	100	1726	1726	100	1553	1558	100	



**CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KUNCI
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
TAHUN 2021-2022**

No	Indikator Kinerja Kunci	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi
		2021	2021	2021	2022	2022	2022
1	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/ dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Rasio pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga Kesehatan)	7.05%	23.4%	100%	7.05%	21.2%	100%
3	Rasio jabatan fungsional yang bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga Kesehatan)	100%	36.2%	36.2%	100%	44.8%	44.8%

Capaian indikator kinerja kunci untuk rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) sebesar 100%. Jumlah pegawai pendidikan tinggi dan menengah sebanyak 1396 orang dan jumlah pegawai pendidikan dasar sebanyak 296 orang sehingga tingkat realisasi mencapai 100%.

Capaian indikator kinerja rasio pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) sebesar 100%. Jumlah pegawai fungsional Tahun 2022 sebanyak 359 orang ASN termasuk sebanyak 233 orang ASN yang dilantik untuk penyetaraan jabatan fungsional pada tanggal 31 Desember 2021 dengan jumlah ASN sebanyak 1692 orang ASN tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan di Tahun 2022, sehingga capaian tingkat realisasi sebesar 100%.

Capaian Rasio jabatan fungsional yang bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga Kesehatan) sebesar 44.8%. Tahun 2022 ada sebanyak 359 orang ASN dengan jabatan fungsional, sehubungan adanya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional ada sebanyak 233 orang ASN yang disetarakan ke jabatan fungsional pertanggal 31 Desember 2021 sehingga total ASN dengan jabatan fungsional sebanyak 359 orang ASN terdiri dari 161 orang ASN yang bersertifikat kompetensi dan 198 orang ASN yang belum memiliki sertifikat kompetensi.



2. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Tabel 3.5
PERBANDINGAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
TAHUN 2017-2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan profesionalitas Aparatur Sipil Negara	Indeks Profesionalitas ASN	75.87	76.44	63.46	53.00

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Meningkatnya Penataan ASN Sesuai dengan Standar Kompetensi	Persentase pejabat struktural yang sesuai dengan kompetensinya	73.40%	100%

Pada tabel diatas, persentase pejabat struktural yang sesuai dengan kompetensinya dilihat dari parameter IP ASN secara sistematis, terukur dan berkesinambungan. Ada 4 variabel yang dilihat yakni kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja dan disiplin. Bobot penilaian kualifikasi sebesar 25%, kemudian untuk kompetensi memiliki bobot 40% dengan parameter yang dilihat antara lain diklat kepemimpinan, diklat fungsional, diklat teknis dan seminar/ workshop/ magang/ kursus/ sejenisnya. Aspek kinerja dengan bobot 30% dan disiplin 5%.

IP ASN ada 4 variabel yang diukur yaitu :

1. Kualifikasi Pendidikan

Dilihat dari riwayat pendidikan formal terakhir baik yang sudah dilakukan penyesuaian ataupun belum dengan bobot penilaian 25%.

2. Kompetensi

Dilihat dari riwayat pengembangan kompetensi yaitu diklat struktural, diklat fungsional dan diklat teknis bagi jabatan struktural/JFT/JFU minimal 20 JP yang diikuti dalam 1 (satu) tahun terakhir dengan bobot penilaian 40%.



3. Kinerja

Dilihat dari data hasil penilaian kinerja yang diperoleh dalam 1 (satu) tahun terakhir dengan bobot penilaian 30%.

4. Disiplin

Dilihat dari riwayat hukuman disiplin yang diterima dalam 5 (lima) tahun terakhir dengan bobot 5%.

Dalam variable pengukuran kompetensi manajerial persentase pejabat struktural sesuai dengan kompetensinya antara lain:

1. Analisa Strategis

Mengidentifikasi, menguraikan, menghubungkan masalah-masalah utama yang dihadapi dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang organisasi.

2. Fleksibilitas Berpikir

Menggunakan berbagai sudut pandang dalam menghadapi berbagai situasi.

3. Inovasi

Membuat solusi alternatif dalam situasi kerja dengan mencoba cara yang berbeda dan orisinal untuk mengatasi masalah.

4. Komunikasi Lisan

Menyampaikan pendapat/ide/informasi secara lisan dengan menggunakan kata/kalimat yang mudah dimengerti orang, baik perorangan maupun dalam kelompok.

5. Komunikasi Tertulis

Menyampaikan pendapat/ide/informasi pemikiran secara jelas dengan menggunakan tulisan dan tata Bahasa dengan baik dan benar.

6. Kegigihan

Bertahan pada rencana tindakan dengan aktivitas dan produktivitas yang tinggi serta tetap fokus sampai sasaran yang diinginkan tercapai atau tidak mungkin lagi dapat dicapai.

7. Mengambil Resiko

Keberanian mengambil tindakan untuk mendapat manfaat dengan telah mempertimbangkan kemungkinan kegagalan dari hasil yang buruk.

8. Pengambilan Keputusan Strategis

Membuat kebijakan dan tindakan yang cepat dan tepat sesuai kepentingan organisasi dengan mempertimbangkan kepentingan semua pihak dan dampak jangka panjang.



9. Perencanaan dan Pengorganisasian

Menyusun rencana kerja dan tindakan dengan mengoptimalkan sumberdaya yang ada untuk pencapaian tujuan organisasi.

10. Berorientasi pada Pelayanan

Memahami dan memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan pelanggan di lingkup internal maupun eksternal organisasi agar tercipta kepuasan pelanggan.

11. Negosiasi

Meyakinkan orang lain melalui berbagai alternatif cara untuk mendapatkan kesepakatan Bersama.

12. Membangun Hubungan Kerjasama Strategis

Membangun dan menaembangkan hubungan kerjasama dengan melibatkan pihak-pihak terkait dan berdampak jangka panjang pada kelompok, departemen dan organisasi.

13. Memfasilitasi Perubahan

Melakukan upaya perubahan organisasi ke arah yang lebih baik dan dapat diterima oleh orang lain serta bertanggung jawab atas implementasi dari perubahan tersebut.

14. Kepemimpinan Strategis

Menciptakan kondisi masa depan organisasi dengan mempengaruhi, menggerakkan orang lain dan mengelola sumber daya yang dimiliki.

Berdasarkan Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, terdapat 3 (tiga) fungsi yang dimiliki oleh Aparatur Sipil Negara, yaitu:

1. Pelaksana kebijakan publik
2. Pelayan publik
3. Perekat dan pemersatu bangsa

Dalam rangka menjalankan fungsi ketiga (perekat dan pemersatu bangsa) setiap ASN perlu memiliki kompetensi sosial kultural sebagaimana amanah Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen ASN.

Kompetensi sosial kultural menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi (Permenpan-RB) Nomor 38 tahun 2017 adalah pengetahuan, keterampilan dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi



oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan

Dalam Permenpan-RB Nomor 38/2017 tersebut diatas, level profisiensi (tingkat kemahiran kompetensi) dibagi dalam 5 (lima) tingkatan yaitu: level 1 (paham/dalam pengembangan), level 2 (dasar), level 3 (menengah), level 4 (mumpuni) dan level 5 (ahli). Leveling dalam kompetensi dimaksudkan untuk menunjukkan standar kompetensi jabatannya.

Level 1, adalah standar kompetensi jabatan yang harus dicapai untuk pelaksana dan jabatan fungsional pemula; Level 2 adalah standar kompetensi jabatan untuk jabatan pengawas dan jabatan fungsional pertama; Level 3 adalah standar kompetensi jabatan untuk jabatan administrator dan jabatan fungsional muda, Level 4 adalah standar jabatan untuk eselon II dan jabatan fungsional madya dan Level 5 adalah standar kompetensi jabatan untuk eselon I dan jabatan fungsional utama. Melalui uji kompetensi akan diketahui tingkat leveling dari pegawai, apakah sudah sesuai dengan jabatan atau belum.

Penilaian akan tingkat kemahiran kompetensi dapat dilihat dari indikator perilaku yang dimiliki oleh pegawai. Lantas, sikap dan perilaku apa yang harus dimiliki dan dikembangkan oleh ASN Kementerian Keuangan dalam mewujudkan kompetensi perekat bangsa? ASN Kementerian Keuangan patut berbangga, karena Kementerian Keuangan memiliki nilai-nilai organisasi sebagai pedoman utama dalam bekerja dan mendukung penguatan kompetensi sosial kultural yang sejalan dengan kode etik dan kode perilaku serta bela negara.

1. Integritas
2. Profesionalisme
3. Sinergi
4. Pelayanan.
5. Kesempurnaan.

Perilaku utama pada nilai kesempurnaan adalah mengembangkan inovasi dan kreatifitas. Sikap yang dapat selaras dengan kompetensi sosial kultural adalah:

- Terbuka terhadap informasi baru, seperti ingin belajar tentang perbedaan/kemajemukan masyarakat;
- Tidak menghalangi kreatifitas/pendapat yang bernilai tambah bagi kemajuan organisasi.

Dari beberapa variabel diatas, dapat dihitung persentase yang dilakukan kepada 491 orang pejabat struktural Kota Pangkalpinang dengan perhitungan melalui indeks profesionalitas ASN dan uji kompetensi terhadap 193 orang pejabat struktural yang terdiri dari eselon II



sebanyak 28 orang, eselon III sebanyak 123 orang dan lurah sebanyak 42 orang. Perhitungan persentase pejabat struktural yang sesuai dengan kompetensi dengan menghitung pejabat struktural yang sesuai dengan kompetensi dibagi dengan total jumlah pejabat struktural yang ada di Pemerintah Kota Pangkalpinang sehingga didapat realisasi sebesar 84.60%, target di Tahun 2022 adalah 79% sehingga didapat target tingkat realisasi persentase pejabat struktural yang sesuai kompetensi Tahun 2022 adalah sebesar 100%. Adapun skor kompetensi yang sesuai dengan variabel diatas yang digunakan untuk pengukuran persentase pejabat struktural sesuai dengan kompetensi adalah sebagai berikut :

1. Skor kompetensi > 90 = memenuhi syarat
2. Skor kompetensi > 70 dan < 90 = masih memenuhi syarat
3. Skor kompetensi < 70 = belum memenuhi syarat

Variabel	Total ASN	Jumlah ASN yang dihitung	%	Target	Tingkat Realisasi
IP ASN	2653	462	45.29%		
Uji kompetensi	491	193	39.31%		
Total			84.60%	79%	100

JENIS	JUMLAH PNS	KUALIFIKASI	KOMPETENSI	KINERJA	DISIPLIN	TOTAL
Keseluruhan	2653	13.21	9.74	19.98	4.99	47.93

JENIS	JUMLAH PNS	KUALIFIKASI	KOMPETENSI	KINERJA	DISIPLIN	TOTAL
Laki-Laki	992	13.01	7.17	19.8	4.98	44.96
Perempuan	1661	13.33	11.28	20.09	5	49.71

JENIS	JUMLAH PNS	KUALIFIKASI	KOMPETENSI	KINERJA	DISIPLIN	TOTAL
Jabatan Struktural	462	14.95	4.24	21.1	5	45.29
Jabatan Fungsional	1539	13.74	14.27	20.19	5	53.21
Pelaksana	652	10.73	2.96	18.69	4.98	37.35



3. Capaian Indikator Kinerja Program/ Kegiatan

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Tabel 3.6
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dan 2022

No	Indikator Kinerja	2021			2022		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang dibuat (dokumen)	2	2	100	2	2	100
2	Jumlah dokumen RENSTRA/RENJA BKPSDMD yang tersusun	3	3	100	3	3	100
3	Jumlah dokumen DPA BKPSDMD yang tersusun	1	1	100	1	1	100
4	Jumlah dokumen perubahan DPA BKPSDMD yang tersusun	1	1	100	1	1	100

- 2) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Tabel 3.7
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dan 2022

No	Indikator Kinerja	2021			2022		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	35	26	74	30	28	93
2	Jumlah dokumen jenis laporan semesteran/ prognosis keuangan yang dibuat (dokumen)	1	1	100	1	1	100
3	Jumlah dokumen jenis laporan keuangan akhir tahun yang dibuat (dokumen)	1	1	100	1	1	100

- 3) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Tabel 3.8
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dan 2022

No	Indikator Kinerja	2021			2022		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	35	26	74	-	-	-
2	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat sesuai tugas dan fungsi	-	-	-	5	4	80



- 4) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Tabel 3.9
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dan 2022

No	Indikator Kinerja	2021			2022		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (bulan)	14	13	93	14	14	100
2	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang dibeli (bulan)	11	7	64	11	11	100
3	Jumlah peralatan rumah tangga yang dibeli yang disediakan (bulan)	12	10	83	12	8	67
4	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dihadiri (bulan)	20	60	100	35	35	100
5	Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia	4	2	50	4	2	50

- 5) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah

Tabel 3.10
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dan 2022

No	Indikator Kinerja	2021			2022		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Jumlah aset tetap lainnya yang disediakan	2	10	100	1	8	100

- 6) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah

Tabel 3.11
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dan 2022

No	Indikator Kinerja	2021			2022		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (bulan)	46	43	93	46	44	96
2	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki (bulan)	12	11	92	26	26	100
3	Jumlah kendaraan	46	43	93	46	44	93



- 7) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah

Tabel 3.12
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dan 2022

No	Indikator Kinerja	2021			2022		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor (kali)	1	1	100	1	1	100
2	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang terpelihara (unit)	4	4	100	4	4	100
3	Jumlah kendaraan perorangan dinas/ kendaraan dinas jabatan yang terpelihara (unit)	1	1	100	1	1	100

- 8) Program Kepegawaian Daerah Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN

Tabel 3.13
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dan 2022

No	Indikator Kinerja	2021			2022		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Jumlah ASN yang lulus sesuai dengan formasi yang diajukan	200	311	100	200	130	65
2	Jumlah CASN yang diangkat menjadi ASN	-	-	-	387	387	100
3	Jumlah SK pensiun yang diterbitkan	100	119	100	135	142	100
4	Jumlah pelaksanaan perayaan HUT KORPRI	3	-	-	3	3	100
5	Jumlah data pelayanan kepegawaian yang dikelola dalam aplikasi SAPK dan e-smile	3000	3018	100	3000	3275	100
6	Jumlah website yang dikelola dan dikembangkan	1	1	100	1	1	100
7	Jumlah data kepegawaian yang dikelola	200	305	100	500	500	100

- 9) Program Kepegawaian Daerah Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN

Tabel 3.14
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dan 2022

No	Indikator Kinerja	2021			2022		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Jumlah PNS yang mengikuti seleksi mutasi dan seleksi jabatan pimpinan tinggi	15	63	420	25	53	100
2	Jumlah SK pangkat ASN yang diterbitkan	600	357	60	600	675	100
3	Jumlah pelaksanaan pembinaan karir PNS	6	8	133	11	7	64



10) Program Kepegawaian Daerah Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN

Tabel 3.15
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dan 2022

No	Indikator Kinerja	2021			2022		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi, ujian dinas dan tambahan masa kerja untuk peningkatan kapasitas kinerja ASN	50	49	98	30	30	100
2	Jumlah ASN Pemkot Pangkalpinang yang menerima bantuan tugas belajar	5	2	40	4	5	100
3	Jumlah ASN yang diangkat dalam jabatan fungsional	50	30	60	30	148	100

11) Program Kepegawaian Daerah Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

Tabel 3.16
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dan 2022

No	Indikator Kinerja	2021			2022		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Jumlah ASN yang akan dinilai (IP ASN) dan dievaluasi kinerja aparatur	-	-	-	3050	2784	91
2	Jumlah ASN yng menerima penghargaan	200	195	98	327	299	100
3	Jumlah penyelesaian kasus ASN yang indisipliner	5	6	120	5	9	100

12) Program Kepegawaian Daerah Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

Tabel 3.13
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dan 2022

No	Indikator Kinerja	2021			2022		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan, uji kompetensi teknis umum dan diklat teknis dan fungsi	100	77	77	50	74	100



13) Program Kepegawaian Daerah Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

Tabel 3.13
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dan 2022

No	Indikator Kinerja	2021			2022		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Jumlah ASN dan CASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi, Pendidikan Pelatihan Kepemimpinan dan Prajabatan	20	154	770	196	196	100

3.3 Analisis Ketersediaan SDM Dalam Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Sampai dengan bulan Desember tahun 2022, jumlah sumber daya aparatur yang ada di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang berjumlah 44 orang. Terdiri dari 26 Orang ASN, 16 Orang PHL.

Persoalan yang dihadapi saat ini antara lain masih banyak pegawai pada setiap bidang yang belum mengikuti Diklat Pengembangan Kompetensi sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Paragraf 4 Pasal 70 ayat 1 s/d ayat 6 tentang Pengembangan Karier dikarenakan belum tersedianya anggaran yang memadai. Akan tetapi, dalam hal pencapaian tujuan dan sasaran kinerja yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan baik.

3.4 Realisasi Anggaran

Pada tahun 2021 dari total anggaran Rp. 5.969.489.800.00,- terealisasi sebesar Rp. 5.099.834.845.00,- atau 85,00%. Sedangkan pada tahun 2022 dari total anggaran Rp. 6.420.299.184.00,- terealisasi sebesar 5.765.418.251.00,- atau 89,80%. Realisasi keuangan pada tahun 2022 dapat dilihat pada penjelasan dibawah ini.



Tabel 3.11
Target dan Realisasi Anggaran Tahun 2022

	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Anggaran	Realisasi Anggaran	Tingkat Realisasi Anggaran
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>			
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	0	0
2.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	0	0	0
3.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	6.675.000	6.675.000	100
4.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0	0	0
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.019.733.734	2.742.078.465	90,81
2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0	0	0
3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	0	0	0
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
1.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0	0	0
2.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	10.000.000	9.100.000	91,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.657.000	5.194.500	91,82
2.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.940.000	2.300.000	78,23
3.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	84.788.500	72.211.810	85,17
4.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	37.647.050	35.480.350	94,24
5.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	328.811.000	328.228.262	99,82
	Konsultasi SKPD			
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
1.	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	78.166.000	72.100.000	92,24
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			



1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	107.500.000	104.962.608	97,64
2.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.037.000	14.057.500	87,66
3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	159.685.500	155.610.500	97,45
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
1.	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	39.173.400	36.464.900	93,09
2.	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	58.400.000	53.995.650	92,46
3.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	21.496.400	21.100.000	98,15
	Program Kepegawaian Daerah			
	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN			
1.	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	17.700.000	14.109.000	79,71
2.	Koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK	15.260.000	6.809.000	44,62
3.	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	7.710.000	5.259.000	68,21
3.	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	246.100.000	180.100.000	73,18
4.	Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	255.860.600	246.329.000	96,27
5.	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	25.350.000	24.900.000	98,22
6.	Pengelolaan Data Kepegawaian	37.500.000	32.429.000	86,48
	Mutasi dan Promosi ASN			
1.	Pengelolaan Mutasi ASN	263.120.000	196.900.000	74,83
2.	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	94.260.000	82.365.950	87,38
3.	Pengelolaan Promosi ASN	19.300.000	10.900.000	56,48
	Pengembangan Kompetensi ASN			
1.	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	9.500.000	4.736.000	49,85
2.	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	104.000.000	30.459.000	29,29
3.	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	5.900.000	4.857.000	82,32
	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			
1.	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	6.810.000	6.119.000	89,85
2.	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Pegawai	8.830.000	0	0,00
3.	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1.875.000	459.000	24,48



	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia			
	<i>Pengembangan Kompetensi Teknis</i>			
1.	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	147.600.000	121.434.000	82.27
	<i>Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</i>			
1.	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1.176.911.000	1.137.693.736	96.67
		6.420.299.184	5.765.418.251	89.80



Tabel 3.12
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Kota Pangkajene Tahun 2017-2021

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Persentase Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Anggaran	
	2016	2019	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(11)	(13)	(14)	(15)	(16)	(16)	(17)	(18)
1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	633.307,914	705.709,150	334.623,141	-	-	656.016,846	580.191,027	619.272,089	326.893,662	-	93,09	91,61	87,75	97,63	-	628.916,279	577.580,628
2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	237.919,000	186.810,000	140.289,000	-	-	116.541,736	206.880,153	168.046,264	136.527,798	-	66,60	66,25	89,96	97,32	-	182.893,967	154.279,742
3. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	20.790,000	26.500,000	-	-	-	-	20.310,000	27.900,000	-	-	-	89,54	97,89	-	-	9.852,000	9.642,000
4. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	135.000,000	186.057,000	28.650,000	-	-	331.399,517	93.567,008	154.531,171	27.961,000	-	66,75	32,22	82,17	97,60	-	177.188,400	139.877,559
5. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	8.000,000	18.000,000	22.730,000	-	-	8.000,000	8.000,000	18.604,000	22.500,000	-	100	100	92,24	96,99	-	14.006,000	13.680,900
6. PROGRAM PENDIDIKAN KEDINASAN	148.880,000	180.000,000	-	-	-	-	148.800,079	175.671,100	-	-	-	86,63	97,60	-	-	298.376,000	290.053,885
7. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KORPRI	40.675,000	300.000,000	-	-	-	43.674,000	37.223,500	283.471,200	-	-	96,11	91,07	94,48	-	-	77.263,000	72.873,740
8. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR (TEKNIS)	382.240,388	2.775.471,000	-	-	-	175.763,704	66.187,286	2.385.240,626	-	-	57,83	93,53	65,94	-	-	815.090,257	641.209,233
9. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR	1.731.116,900	2.039.525,000	-	-	-	1.341.194,953	1.209.780,323	1.823.337,631	-	-	92,99	94,63	81,19	-	-	1.355.342,580	1.081.758,348
10. PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	-	-	1.641.982,453	1.728.098,450	1.728.066,450	-	-	-	1.961.765,602	1.267.374,245	-	-	-	90,22	89,87	1.786.624,452	1.434.569,924
11. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	3.356.262,892	3.356.262,892	-	-	-	-	3.189.202,200	-	-	-	95,02	-	3.356.262,892	3.189.202,200



12. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	-	-	-	885,160,858	885,160,858	-	-	-	-	703,258,400	-	-	-	-	79,46	885,160,858	703,258,400



BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2022, disusun untuk mewujudkan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta media untuk menginformasikan capaian kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2022. Pelaporan kinerja menjadi media evaluasi, sekaligus instrument untuk melakukan perbaikan yang tepat dan berkesinambungan. Secara umum, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang dalam mencapai sasaran strategis tahun 2022 cukup baik, karena pada sebagian besar indikator berhasil mencapai target yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Tahun 2022.

Pada tahun 2021 dari total anggaran Rp. 5.969.489.800.00,- terealisasi sebesar Rp. 5.099.834.845.00,- atau 85,00%. Sedangkan pada tahun 2022 dari total anggaran Rp. 6.420.299.184.00,- terealisasi sebesar 5.765.418.251.00,- atau 89,80%.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2022 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah telah menyajikan keseluruhan profil kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang. Namun demikian, disadari sepenuhnya bahwa ada keterbatasan sehingga Laporan Kinerja ini masih belum sempurna sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itu, perbaikan-perbaikan segera dilakukan khususnya menyangkut perbaikan terhadap penetapan indikator-indikator kinerja dan pengumpulan data serta analisisnya secara lebih sistematis dan terukur. Review dari pihak evaluator SAKIP pasti diperlukan untuk kesempurnaan penyusunan dokumen LAKIP selanjutnya.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 ini disusun dan disampaikan setiap akhir tahun anggaran sebagai bentuk pertanggungjawaban dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang.

TRIWULAN I
Evaluasi Terhadap Hasil Renja
Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kota Pangkalpinang Tahun 2022

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2022								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab								
							I				II									III				IV			
							1		Rp		2		Rp							3		Rp		4		Rp	
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13								
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp									
1	-	050301	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu (Dengan Satuan%)	100	3.376.712.584	100	379.887.547	0	0	0	0	0	0	100	379.887.547	100	9,328	Sekretariat								
				Persentase terpenuhinya kebutuhan Administrasi perkantoran (Dengan Satuan%)	100		100		0	0	0	0	0	100			100		Sekretariat								
				Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik (Dengan Satuan%)	100		100		0	0	0	0	0	100			100		Sekretariat								
				Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/kuadifikasi pada unit kerjanya (Dengan Satuan%)	100		0		0	0	0	0	0	0			0		Sekretariat								
2		050301201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan penganggaran dan Evaluasi Kinerja tepat waktu (Dengan Satuan%)	100	6.675.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kasubbag PEP dan Keuangan								
3		050301201300	Kordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA SKPD yang tersusun (Dengan Satuan:Dokumen)	1	6.675.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kasubbag PEP dan Keuangan								
4		050301202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya kebutuhan Administrasi keuangan (Dengan Satuan%)	100	2.015.733.794	25	348.917.567	0	0	0	0	0	0	25	348.917.567	100	11,557	Kasubbag PEP dan Keuangan								

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Ranja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2022								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Ranja Perangkat Daerah yang direvisi tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Rantra Perangkat Daerah s/d tahun 2022		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							I		II		III		IV						
							7	8	9	10	11	12	13	14					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
5		05001202001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan (Dengan Satuan Orang)	30	3.019.731.734	27	348.877.567	0	0	0	0	0	0	27	348.877.567	90	11.007	Kasubag PEP dan Kepegawaian
6		05001205	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tercapainya Administrasi Kepegawaian (Dengan Satuan%)	100	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
7		05001205008	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berlatarkan Tugas dan Fungsi	jumlah pegawai yang mengikuti Diklat sesuai tugas dan fungsi (Dengan Satuan Orang)	5	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sub Koordinator Pendidikan dan Pelatihan	
8		05001208	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tercapainya administrasi umum (Dengan Satuan%)	100	461.443.550	25	0	0	0	0	0	0	25	0	100	0	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
9		05001206001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah komponen instalasi listrik penerangan Bangunan Kantor yang disediakan (Dengan Satuan jenis)	11	5.897.000	9	0	0	0	0	0	0	9	0	81,818	0	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
10		05001206003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan (Dengan Satuan Set)	12	2.940.000	3	0	0	0	0	0	0	3	0	25	0	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
11		05001206004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah jenis bahan logistik yang disediakan (Dengan Satuan jenis)	4	84.798.500	2	0	0	0	0	0	0	2	0	50	0	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
12		05001206005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan (Dengan Satuan Set)	14	39.347.050	18	0	0	0	0	0	0	18	0	71,429	0	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
13		05001206008	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi (SKR)	jumlah Koordinasi dan Konsultasi yang dilakukan (Dengan Satuan Kali)	25	328.821.000	18	0	0	0	0	0	0	18	0	51,429	0	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
14		05001207	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tercapainya pengadaan barang milik daerah (Dengan Satuan%)	100	75.184.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
15		05001207001	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	jumlah Aset Tetap Lainnya yang disediakan (Dengan Satuan Unit)	1	78.166.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kasubag Umum dan Kepegawaian	

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2022								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							I		II		III		IV						
							1	2	3	4	5	6	7	8					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
16		05001106	Penyediaan Jasa Pemungut Sisaan Pemerintahan Daerah	Persentase tercapainya penyediaan jasa (Dengan Satuan%)	100	283.821.500	25	21.100.000	0	0	0	0	0	0	25	21.100.000	100	8.202	Kasubag Umum dan Kepegawaian
17		0500110602	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah aparaturnya internal BKPSDM yang terlayani (Dengan Satuan-Orang)	40	105.900.000	44	0	0	0	0	0	0	0	44	0	95,653	0	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18		0500110603	Penyediaan Jasa Perawatan dan Peralengkapan Kantor	Jumlah perjalanan dan pertengkapan kantor yang diperbaiki (Dengan Satuan Unit)	20	10.027.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,769	0	Kasubag Umum dan Kepegawaian
19		0500110604	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah aparaturnya internal BKPSDM yang terlayani (Dengan Satuan-Orang)	40	159.685.500	44	20.100.000	0	0	0	0	0	0	44	20.100.000	99,852	14.466	Kasubag Umum dan Kepegawaian
20		05001106	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemungut Sisaan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah pemungut sisaan pemerintahan daerah (Dengan Satuan%)	100	119.071.000	25	6.810.000	0	0	0	0	0	0	25	6.810.000	100	5.719	Kasubag Umum dan Kepegawaian
21		0500110605	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan yang dipelihara (Dengan Satuan Unit)	1	28.171.400	1	3.460.000	0	0	0	0	0	0	1	3.460.000	100	0,001	Kasubag Umum dan Kepegawaian
22		0500110602	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perbaikan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara (Dengan Satuan Unit)	4	58.400.000	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	100	0	Kasubag Umum dan Kepegawaian
23		0500110608	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor/bangunan lainnya yang dipelihara (Dengan Satuan Unit)	1	21.496.400	1	3.350.000	0	0	0	0	0	0	1	3.350.000	100	10,583	Kasubag Umum dan Kepegawaian
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																	75,000	8,528	
PREDIKAT KINERJA																	0	00	
24	-	000003	PROGRAM KEPENGAWAIAN DAERAH	Rasio pegawai fungsional (Dengan Satuan%)	7.500	1.129.075.600	1.250	37.514.000	0	0	0	0	0	0	2.250	37.514.000	30	3,303	Persentase, Pengadaan, Mutasi dan Data

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2022								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d tahun 2022		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							I		II		III		IV						
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13							
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
				Rasio jabatan fungsional yang bersertifikat kompetensi (Dengan Satuan%)	100		38		0	0	0	0	38		38		Perencanaan, Pengadaan, Mutasi dan Data		
				Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) (Dengan Satuan%)	100		57		0	0	0	0	57		57,000		Perencanaan, Pengadaan, Mutasi dan Data		
25		050302201	Pengadaan, Peningkatan dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase pelaksanaan pengadaan, peningkatan dan pemberian informasi kepegawaian ASN (Dengan Satuan%)	100	405.480.000	57	37.514.000	0	0	0	0	0	57	37.514.000	100	6.196	Sub Koordinator Perencanaan, Data dan Informasi	
26		050302201001	Pengusunan Rencana kebutuhan jenis dan jumlah jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah ASN yang lulus sesuai dengan format yang diajukan (Dengan Satuan:Orang)	200	17.700.000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sub Koordinator Pengadaan dan Pengangkatan	
27		050302201003	Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah ASN yang diangkat menjadi ASN (Dengan Satuan:Orang)	387	15.280.000	387		0	0	0	0	0	387	0	100	0	Sub Koordinator Pendidikan dan Pelatihan	
28		050302201004	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah SK pensiun yang diterbitkan (Dengan Satuan:Orang)	135	7.710.000	48		0	0	0	0	0	48	0	35.504	0	Sub Koordinator Mutasi dan Pemberhentian	
29		050302201006	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah pelaksanaan program KUT KORPRI (Dengan Satuan:event)	3	248.130.000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sub Koordinator Profesi ASN dan Eksklusivitas Pegawai	
30		050302201008	Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Jumlah data pelayanan kepegawaian yang dikelola dalam aplikasi SAPK dan e-unik (Dengan Satuan:Data)	3.000	255.880.000	1.304	37.514.000	0	0	0	0	0	1.304	37.514.000	38	14.642	Sub Koordinator Perencanaan, Data dan Informasi	
31		050302301001	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah website yang dikelola dan dikembangkan (Dengan Satuan:Website)	1	25.350.000	1		0	0	0	0	0	1	0	100	0	Sub Koordinator Pendidikan dan Pelatihan	
32		050302301011	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah data kepegawaian yang dikelola (Dengan Satuan:Orang)	500	57.500.000	352		0	0	0	0	0	352	0	70.400	0	Sub Koordinator Perencanaan, Data dan Informasi	

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2022								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah s/d tahun 2022		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							I		II		III		IV						
							1	2	3	4	5	6	7	8					
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	13		
33		050303302	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase pelaksanaan mutasi dan promosi ASN (Dengan Satuan-%)	100	276.680.000	30		0	0	0	0	0	0	30	0	100	0	Sub Koordinator Mutasi dan Pemberhentian
34		050303302001	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah PNS yang mengikuti seleksi mutasi dan sesuai jabatan pimpinan tinggi (Dengan Satuan-Orang)	20	283.120.000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sub Koordinator Mutasi dan Pemberhentian
35		050303302002	Pengelolaan Karir ASN	Jumlah SK pangkat ASN yang diterbitkan (Dengan Satuan-Orang)	600	94.280.000	478		0	0	0	0	0	0	478	0	79,667	0	Sub Koordinator Pengadaan dan Pengembangan
36		050303302003	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah pelaksanaan Promosi Karir PNS (Dengan Satuan-kali)	8	19.500.000	1		0	0	0	0	0	0	1	0	12,500	0	Sub Koordinator Mutasi dan Pemberhentian
37		050303303	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase pelaksanaan pengembangan kompetensi ASN (Dengan Satuan-%)	100	119.400.000	88		0	0	0	0	0	0	88	0	100	0	Sub Koordinator Pengadaan dan Pengembangan
38		050303303001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang mengikuti Sosialisasi, ujian dinas dan tambahan masa kerja untuk peningkatan kapasitas kinerja ASN (Dengan Satuan-Orang)	30	9.500.000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sub Koordinator Pengadaan dan Pengembangan
39		050303303004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN Peserta Pengembangan yang menerima bantuan biaya tugas belajar (Dengan Satuan-Orang)	4	104.900.000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sub Koordinator Pengembangan dan Sertifikasi
40		050303303014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam jabatan Fungsional	Jumlah ASN yang diangkat dalam jabatan Fungsional (Dengan Satuan-Orang)	30	5.900.000	108		0	0	0	0	0	0	108	0	100	0	Sub Koordinator Pengadaan dan Pengembangan
41		050303304	Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja ASN (Dengan Satuan-%)	100	17.525.000	43		0	0	0	0	0	0	43	0	100	0	Sub Koordinator Perencanaan, Data dan Informasi
42		050303304001	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah ASN yang akan dinilai (P ASN) dan dievaluasi kinerja aparatur (Dengan Satuan-Orang)	1.050	6.800.000	1.500		0	0	0	0	0	0	1.500	0	40,190	0	Sub Koordinator Perencanaan, Data dan Informasi
43		050303304004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang menerima penghargaan (Dengan Satuan-Orang)	327	8.800.000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sub Koordinator Profesi ASN dan Kesejahteraan Pegawai

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2022								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah s/d tahun 2022		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							I		II		III		IV						
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
44		050302304908	Pengelolaan Penyelenggaraan, Didikin ASN	Jumlah penyelesaian kasus ASN yang indisipliner (Dengan Satuan:Kasus)	5	1.875.000	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	80	0	Sub Koordinator Mutasi dan Pemberhentian
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																41,667	5,353		
PREDIKAT KINERJA																SA	SB		
45	-	050402	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DATA MANUSIA	Persentase ASN yang mempunyai kapasitas dan kompetensi (Dengan Satuan:%)	70	1.326.511.000	1	90.783.000	0	0	0	0	0	0	1	90.783.000	1,282	6,854	Pendidikan Pelatihan, Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai
46		050402201	Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis (Dengan Satuan:%)	100	147.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sub Koordinator Pengembangan dan Sertifikasi
47		050402201303	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, WU, dan Pishan bagi jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Korporasi, Perangkat Daerah Perundang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis umum dan disiplin teknis dan fungsi (Dengan Satuan:Orang)	50	147.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sub Koordinator Pengembangan dan Sertifikasi
48		050402202	Sertifikasi, Kolaborasi, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase ASN yang mengikuti sertifikasi, kolaborasi, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional (Dengan Satuan:%)	100	1.176.911.000	2	90.783.000	0	0	0	0	0	0	2	90.783.000	100	7.734	Sub Koordinator Pendidikan dan Pelatihan
49		050402202007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, jabatan Pimpinan Tinggi, jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Pejabat	Jumlah ASN dan CASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi, Pendidikan Pelatihan kepemimpinan dan prajabatan (Dengan Satuan:Orang)	100	1.176.911.000	3	90.783.000	0	0	0	0	0	0	3	90.783.000	1,531	7.734	Sub Koordinator Pendidikan dan Pelatihan
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																1,282	6,854		
PREDIKAT KINERJA																SA	SB		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN SEMUA PROGRAM (%)																55,285	6,578		

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2022	Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2022								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah s/d tahun 2022	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab			
						I		II		III		IV							
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13							
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
PREDIKAT KINERJA																			
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:				- Pelaksanaan Kegiatan Berjalan Sesuai dengan jadwal yang telah di Rencanakan, dan Pelaksanaan Pencairan Kasangan Disesuaikan dengan Kebutuhan															
Faktor penghambat pencapaian kinerja:				- Honorarium pembahas, uang lembur dan makan minum kegiatan direncanakan untuk kegiatan pengangkutan tenaga pengk guru yang teroris tahun 2021 tetapi pada tahun 2022 tidak dilaksanakan sehingga pencairan belanja tersebut disesuaikan dengan kebutuhan - Dikarenakan pengisian promisi ASN sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dan dibawah dari target sehingga uang lembur dan honorarium pembahas dibatalkan pencairan sesuai dengan kebutuhan - Secara realisasi fisik telah terpenuhi untuk peningkatan pendidikan dan peng, untuk pelaksanaan ujian divas dan penyusunan jajah tidak dilaksanakan dikarenakan kekurangan anggaran sehingga uang lembur dibatalkan untuk pelaksanaan ujian divas dan penyusunan jajah tidak dapat direalisasikan - Tidak adanya realisasi disebabkan peruntukannya untuk jasa ekspedisi pengiriman barang, namun untuk pengiriman berkas dari uraian Satya Lancana Karya Satya sudah menggunakan daring (online), sehingga tidak digunakan anggaran tersebut - Dikarenakan proses pemeriksaan berkas dan penyampaian berkas dilaksanakan secara langsung ke BEM maka belanja pengiriman berkas dan belanja makan dan minum rapat tidak dapat dilakukan pencairan - Hal ini dikarenakan ada beberapa PMS Tugas Belajar yang meninggalkan tugas mendapatkan beasiswa penuh dari Kementerian Republik Indonesia dan Beasiswa dari Rappenas serta Beasiswa tidak penuh dari Universitas - Kegiatan yang melibatkan narasumber, moderator, pembawa acara dan panitia tidak dicairkan karena kegiatan tersebut telah dilaksanakan sebelum DPA perubahan kedua.															
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:				- Melaksanakan Proses Penilaian Anggaran Kegiatan Sesuai dengan Dijadwalkan															
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah pada berikutnya:				- Melaksanakan Proses Pencairan Anggaran Kegiatan Sesuai Dengan Dijadwalkan															
Dievaluasi Kota Pangkalpinang, tanggal 07-03-2023 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA PANGKALPINANG  (TAMBAH: S.T. NIP.1975.02.26.2008041001																			

TRIWULAN II
Evaluasi Terhadap Hasil Renja
Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kota Pangkalpinang Tahun 2022

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2022								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							I		II		III		IV						
							7		8		9		10						
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	-	000001	PROGRAM PENGUATAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase laporan kinerja dan kasangan yang disampaikan tepat waktu (Dengan Satuan:%)	100	3.876.712.384	100	376.867.367	100	1.176.265.766	0	0	0	0	100	1.334.461.373	100	35.000	Sekretariat
				Persentase tercapainya seluruh Administrasi perkantoran (Dengan Satuan:%)	100		100		100		0	0	0	0	100		100		Sekretariat
				Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik (Dengan Satuan:%)	100		100		100		0	0	0	0	100		100		Sekretariat
				Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/kuifikasi pada unit kerjanya (Dengan Satuan:%)	100		0		0		0	0	0	0			0		Sekretariat
2		050001201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan/penganggaran dan Evaluasi Kinerja tepat waktu (Dengan Satuan:%)	100	6.675.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kasubag PEP dan Keuangan
3		05000120105	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan IPA- SIPD	Jumlah dokumen kebijakan DFA- BAPSIKMD yang tersusun (Dengan Satuan: Dokumen)	1	6.675.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kasubag PEP dan Keuangan
4		050001202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tercapainya seluruh Administrasi Keuangan (Dengan Satuan:%)	100	3.019.733.734	25	349.371.967	50	888.022.298	0	0	0	0	50	1.256.899.965	100	41,62%	Kasubag PEP dan Keuangan

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2022	Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2022								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah s/d tahun 2022	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab			
						I		II		III		IV							
						1	2	3	4	5	6	7	8						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13							
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
3		0500020001	Pengadaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan (Dengan Satuan:Orang)	26	3.019.731.734	27	349.977.967	25	908.022.298	0	0	0	0	30	1.354.999.805	100	41,626	Kasubag PEP dan Keuangan
4		05000200	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya Administrasi Kepegawaian (Dengan Satuan:%)	100	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kasubag Umum dan Kepegawaian
7		0500020009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat sesuai tugas dan fungsi (Dengan Satuan:Orang)	9	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sub Koordinator Pendidikan dan Pelatihan
8		05000200	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi umum (Dengan Satuan:%)	100	461.463.700	25	0	50	147.637.513	0	0	0	0	50	147.637.551	100	31,995	Kasubag Umum dan Kepegawaian
9		05000206001	Penyediaan Komputer Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komputer Instalasi Listrik/ penerangan Bangunan Kantor yang disediakan (Dengan Satuan:Jenis)	11	5.857.000	9	0	13	1.096.000	0	0	0	0	11	1.096.000	100	14,374	Kasubag Umum dan Kepegawaian
10		05000206003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan (Dengan Satuan:Jenis)	12	2.940.000	3	0	3	400.000	0	0	0	0	3	400.000	25	16,327	Kasubag Umum dan Kepegawaian
11		05000206004	Penyediaan Bahan Cetak Kantor	Jumlah jenis bahan cetak yang disediakan (Dengan Satuan:Jenis)	4	84.788.500	2	0	2	31.814.200	0	0	0	0	2	31.814.200	50	31,522	Kasubag Umum dan Kepegawaian
12		05000206005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan (Dengan Satuan:Jenis)	14	29.247.000	10	0	11	17.761.250	0	0	0	0	11	17.761.250	78,571	45,155	Kasubag Umum dan Kepegawaian
13		05000206009	Pengembangan Rapid Response dan Kemitraan DPRD	Jumlah Koordinasi dan Kemitraan yang dilakukan (Dengan Satuan:Rai)	35	528.611.000	18	0	25	96.486.061	0	0	0	0	25	96.486.061	71,429	29,344	Kasubag Umum dan Kepegawaian
14		050004237	Pengadaan Barang Milik Daerah Pemukiman Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah (Dengan Satuan:%)	100	76.166.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kasubag Umum dan Kepegawaian
15		05000207007	Pengadaan Asap Teras Lantai	Jumlah Asap Teras Lantai yang disediakan (Dengan Satuan:Jenis)	1	76.166.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kasubag Umum dan Kepegawaian

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2022		Realisasi Kinerja Pada Trimester tahun 2022								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah s/d tahun 2022		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							I		II		III		IV						
							1	2	3	4	5	6	7	8					
1	2	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
16		050301200	Pengadaan jasa Pemeliharaan Mesin Akumulasi Daerah	Persentase tercapainya pemeliharaan jasa (Dengan Satuan/mt)	100	261.821.500	25	25.300.000	50	84.644.857	0	0	0	0	50	107.744.657	100	34.258	Kasubidg Umum dan Kepegawaian
17		050301200002	Pengadaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah aparaturnya internal BAPSDMD yang melayani (Dengan Satuan/Orang)	40	105.900.000	44	0	45	40.388.457	0	0	0	0	45	40.388.457	97,828	38.112	Kasubidg Umum dan Kepegawaian
18		050301200003	Pengadaan jasa Perawatan dan Perbaikan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki (Dengan Satuan/mt)	20	16.057.000	0	0	0	1.603.000	0	0	0	0	0	1.603.000	30,768	5.966	Kasubidg Umum dan Kepegawaian
19		050301200004	Pengadaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah aparaturnya internal BAPSDMD yang melayani (Dengan Satuan/Orang)	40	158.495.500	44	23.300.000	45	41.681.395	0	0	0	0	45	45.783.395	97,828	41.184	Kasubidg Umum dan Kepegawaian
20		050301200	Pemeliharaan Sarang Rata Daerah Pemungut Sampah Perumahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarang rata daerah pemungut sampah wilayah pemerintahan daerah (Dengan Satuan/mt)	100	119.871.800	25	4.810.000	50	25.286.800	0	0	0	0	50	42.496.800	100	35.354	Kasubidg Umum dan Kepegawaian
21		050301200001	Pengadaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pula Kendaraan Perawatan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan	Jumlah kendaraan dinas per orang dinas/kendaraan dinas jabatan yang dipelihara (Dengan Satuan/mt)	1	38.173.400	1	1.480.000	1	8.440.000	0	0	0	0	1	11.000.000	100	30.378	Kasubidg Umum dan Kepegawaian
22		050301200002	Pengadaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pula dan Perawatan Kendaraan Dinas, Operasional atau Liputan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau liputan yang dipelihara (Dengan Satuan/mt)	4	58.400.000	4	0	4	29.824.300	0	0	0	0	4	29.824.300	100	20.858	Kasubidg Umum dan Kepegawaian
23		050301200003	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor/bangunan lainnya yang dipelihara (Dengan Satuan/mt)	1	21.498.400	1	1.350.000	1	6.525.000	0	0	0	0	1	6.375.000	100	43.608	Kasubidg Umum dan Kepegawaian
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																	75,000	35,886	
PREDIKAT KINERJA																	S	SB	
24	-	050302	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Rasio pegawai fungsional (Dengan Satuan/%)	7,500	1.519.875.000	7,130	37.514.000	8,540	121.435.000	0	0	0	0	8,540	188.849.000	47,360	16,884	Perencanaan, Pelaksanaan, Mutasi dan Data

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2022								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang direalisasi tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							I		II		III		IV						
							1	2	3	4	5	6	7	8					
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				Basis jabatan fungsional yang bersertifikat kompetensi (Dengan Satuan%)	100		38		70		0	0		70		70			Perencanaan, Pengadaan, Mutasi dan Data
				Basis pegawai pendidikan tinggi dan menengah/ dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga keahliatan) (Dengan Satuan%)	100		57		68		0	0		68		68			Perencanaan, Pengadaan, Mutasi dan Data
25		05000200	Pengadaan, Pemeliharaan dan Pelatihan Kepegawaian	Persentase pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan dan pemberian informasi kepegawaian ASN (Dengan Satuan %)	100	605.400.000	57	37.314.000	68	75.775.000	0	0	0	0	68	113.280.000	100	18,71	Sub Koordinator Perencanaan, Data dan Informasi
26		05000201002	Pengusutan Rencana Kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk Pelaksanaan Pengisian ASN	Jumlah ASN yang lulus sesuai dengan format yang diajukan (Dengan Satuan Orang)	200	17.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sub Koordinator Pengadaan dan Pengangkatan
27		05000201003	Kordinasi dan Fasilitas Pengisian PNS dan PPP	Jumlah ASN yang diangkat menjadi ASN (Dengan Satuan Orang)	387	15.200.000	387	0	387	5.800.000	0	0	0	0	387	5.400.000	100	97,92	Sub Koordinator Pendidikan dan Pelatihan
28		05000201008	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi dan Pemberhentian	Jumlah SK personil yang diterbitkan (Dengan Satuan Orang)	135	7.710.000	48	0	79	0	0	0	0	0	79	0	58,52	0	Sub Koordinator Mutasi dan Pemberhentian
29		05000201008	Fasilitas Lembaga Profesi ASN	Jumlah pelatihan/pengayaan MTW KOPRI (Dengan Satuanorang)	1	340.100.000	0	0	1	5.400.000	0	0	0	0	1	5.400.000	100	2,19	Sub Koordinator Profesi ASN dan Kesejahteraan Pegawai
30		05000201009	Perumusan Bahan Kajian Pengisian Data dan Informasi ASN	Jumlah data pelayanan kepegawaian yang diinput dalam aplikasi SAP dan e-Smls (Dengan Satuan Data)	1.000	255.300.000	1.000	37.314.000	1.000	64.725.000	0	0	0	0	1.000	100.210.000	99,86	79,95	Sub Koordinator Perencanaan, Data dan Informasi
31		05000201010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah website yang dibuat dan dikembangkan (Dengan Satuan Website)	1	25.350.000	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	100	0	Sub Koordinator Pendidikan dan Pelatihan
32		05000201011	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah data kepegawaian yang diinput (Dengan Satuan Orang)	500	37.580.000	352	0	355	0	0	0	0	0	355	0	71	0	Sub Koordinator Perencanaan, Data dan Informasi

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Rencana Perangkat Daerah Tahun berjalan 2022	Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2022								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Rencana Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Rencana Perangkat Daerah s.d tahun 2022	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab			
						I		II		III		IV							
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13							
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
33		05090203	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase pelaksanaan mutasi dan promosi ASN (Dengan Satuan %)	100	75.600.000	30	0	47	75.600.000	0	0	0	0	47	75.600.000	100	20.000	Sub Koordinator Mutasi dan Pemberhentian
34		0509020301	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah PNS yang mengikuti seleksi mutasi dan seleksi jabatan pimpinan tinggi (Dengan Satuan Orang)	21	363.120.000	0	0	7	47.500.000	0	0	0	0	7	47.500.000	10.000	10.000	Sub Koordinator Mutasi dan Pemberhentian
35		0509020302	Pengelolaan Karir ASN	Jumlah SK pengukut ASN yang diterbitkan (Dengan Satuan Orang)	600	94.760.000	470	0	470	22.000.000	0	0	0	0	470	22.000.000	70.000	25.000	Sub Koordinator Pengadaan dan Pengembangan
36		0509020303	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah pelaksanaan Pembinaan Karir PNS (Dengan Satuan Kali)	0	10.300.000	1	0	3	6.100.000	0	0	0	0	3	6.100.000	37.500	21.000	Sub Koordinator Mutasi dan Pemberhentian
37		05090204	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase pelaksanaan pengembangan kompetensi ASN (Dengan Satuan %)	100	110.000.000	10	0	91	0	0	0	0	0	91	0	100	0	Sub Koordinator Pengadaan dan Pengembangan
38		0509020301	Peningkatan Kapasitas ASN	Jumlah ASN yang mengikuti Sosialisasi, ulan dras dan latihan kerja untuk peningkatan kapasitas kinerja ASN (Dengan Satuan Orang)	30	6.900.000	0	0	22	0	0	0	0	0	22	0	75.000	0	Sub Koordinator Pengadaan dan Pengembangan
39		0509020304	Pengelolaan Pendidikan lanjutan ASN	Jumlah ASN Pemiel Pendidikan yang menerima sertifikat daya gugat belajar (Dengan Satuan Orang)	4	104.000.000	0	0	4	0	0	0	0	0	4	0	100	0	Sub Koordinator Pengembangan dan Sertifikasi
40		0509020304	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam jabatan fungsional	Jumlah ASN yang diangkat dalam jabatan fungsional (Dengan Satuan Orang)	30	5.900.000	100	0	100	0	0	0	0	0	100	0	100	0	Sub Koordinator Pengadaan dan Pengembangan
41		05090204	Pengembangan Sistem Aparatur	Persentase pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja ASN (Dengan Satuan %)	100	17.515.000	40	0	99	0	0	0	0	0	40	0	100	0	Sub Koordinator Pemrosesan, Data dan Informasi
42		0509020402	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah ASN yang akan dinilai (IP ASN) dan dievaluasi kinerja aparatur (Dengan Satuan Orang)	3.000	6.810.000	1.500	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0	65.574	0	Sub Koordinator Pemrosesan, Data dan Informasi

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2022								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	
							I		II		III		IV						
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12	13	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
43		05032204034	Pengelolaan Pemeliharaan Penghantaran Biji Padi	Jumlah ASR yang menerima penghantaran (Dengan Satuan:Orang)	327	8.835.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sub Koordinator Profil ASR dan Kesejahteraan Pegawai	
44		05032204038	Pengelolaan Penyelesaian Kelangkaan Duplikat ASR	Jumlah penyelesaian kasus ASR yang insidivis (Dengan Satuan:kasus)	1	1.875.000	4	0	4	0	0	0	0	0	4	0	0	Sub Koordinator Mutasi dan Pembudidayaan	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																	61,733	16,884	
PREDIKAT KINERJA																	A	B	
45	-	050403	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang mempunyai kapasitas dan kompetensi (Dengan Satuan:%)	76	1.324.311.000	1	90.783.000	16	90.000.000	0	0	0	0	16	140.783.000	76,313	16,629	Pendidikan Pelatihan, Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai
46		050402105	Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis (Dengan Satuan:%)	100	147.600.000	0	0	30	50.000.000	0	0	0	0	30	50.000.000	100	33,875	Sub Koordinator Pengembangan dan Sertifikasi
47		050402103003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pribadi bagi Jajaran Administrasi Penyelenggara Urutan Pemerintahan Kabupaten, Perangkat Daerah, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan, uji kompetensi teknis umum dan disiplin teknis dan fungsi (Dengan Satuan:Orang)	50	147.600.000	0	0	30	50.000.000	0	0	0	0	30	50.000.000	60	33,875	Sub Koordinator Pengembangan dan Sertifikasi
48		050403100	Sertifikasi, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase ASN yang mengikuti sertifikasi, keterampilan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional (Dengan Satuan:%)	100	1.176.311.000	2	90.783.000	2	0	0	0	0	0	2	90.783.000	100	1,734	Sub Koordinator Pendidikan dan Pelatihan
49		05040310001	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Peningkat Daerah (Jabatan Peningkat Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Regulasi)	Jumlah ASN dan CNM yang mengikuti Pengembangan kompetensi, Pendidikan Pelatihan kepemimpinan dan regulasi (Dengan Satuan:Orang)	196	1.176.311.000	2	90.783.000	2	0	0	0	0	0	2	90.783.000	1,531	1,734	Sub Koordinator Pendidikan dan Pelatihan
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																	76,313	16,629	

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Biaya Perangkat Daerah Tahun berjalan 2022	Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2022								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Biaya Perangkat Daerah yang direalisasi tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Rencana Perangkat Daerah s.d tahun 2022		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
						I		II		III		IV																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
						1	2	3	4	5	6	7	8		9	10		11	12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
PREDIKAT KINERJA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

TRIWULAN III
Evaluasi Terhadap Hasil Renja
Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kota Pangkalpinang Tahun 2022

No	Sumber	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Sesuai Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2022								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah s/d tahun 2022		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
							I		II		III		IV						
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1	-	000001	PROGRAM PENGANGKUTAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu (Dengan Satuan:%)	100	2.875.712.584	100	376.897.367	100	1.175.553.766	100	958.088.154	0	0	100	3.564.563.487	100	62,583	Sekertaris
				Persentase terpenuhinya kebutuhan Administrasi perkantoran (Dengan Satuan:%)	100		100		100		100		0	0	100		100		Sekertaris
				Persentase serani dan pengadaan Aparatur dalam kondisi baik (Dengan Satuan:%)	100		100		100		100		0	0	100		100		Sekertaris
				Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/keahlian pada unit kerjanya (Dengan Satuan:%)	100		0		0		100		0	0	100		100		Sekertaris
2		00000201	Pengamanan, Pengangkutan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pengangkutan dan evaluasi kinerja tepat waktu (Dengan Satuan:%)	100	8.875.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fasutbang PEP dan Keuangan
3		000002010001	Kordinasi dan Pengawasan Perhubungan (KRL, SPP)	Jumlah dokumen pendataan DPA BAPSIWD yang terakumulasi (Dengan Satuan:Dokumen)	1	8.875.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Fasutbang PEP dan Keuangan
4		00000202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya kebutuhan Administrasi Keuangan (Dengan Satuan:%)	100	9.018.703.734	25	946.971.367	50	988.022.298	75	751.855.963	0	0	75	2.098.405.948	100	48,514	Fasutbang PEP dan Keuangan
5		00000140001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan (Dengan Satuan:Orang)	30	9.018.703.734	27	348.971.367	10	988.022.298	28	751.855.963	11	0	28	2.098.405.948	93,333	60,514	Fasutbang PEP dan Keuangan

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Rangka Perangkat Daerah Tahun berjalan 2022	Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2022								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Rangka Perangkat Daerah yang direalisasi tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Rangka Perangkat Daerah s.d tahun 2022	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
						I		II		III		IV							
						1	2	3	4	5	6	7	8						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13							
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
6		00200100	Administrasi Kependudukan Perangkat Daerah	Penelitian, pengembangan Administrasi Kependudukan (Dengan Satuan %)	100	10.000.000	0	0	0	0	4	8.000.000	0	0	4	8.000.000	100	91	Kecamatan Umum dan Kependudukan
7		00200105008	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berbasis Tugas dan Fungsi	jumlah pegawai yang mengikuti Diklat sesuai tugas dan fungsi (Dengan SatuanOrang)	5	10.000.000	0	0	0	0	4	8.000.000	0	0	4	8.000.000	80	91	Sekolah Koordinator Pendidikan dan Pelatihan
8		002001100	Administrasi umum Perangkat Daerah	Penelitian, pengembangan administrasi umum (Dengan Satuan%)	100	403.443.330	23	0	30	147.437.311	73	78.298.794	6	0	70	325.794.303	100	86,932	Kecamatan Umum dan Kependudukan
9		00200110001	Penyediaan Kampas (Matras) Listrik/Pematangan Bangunan Kantor	jumlah kampas matras listrik/ pematangan bangunan kantor yang disediakan (Dengan SatuanLembar)	11	5.457.000	0	0	11	5.096.800	11	5.305.500	0	0	11	5.301.300	100	98,918	Kecamatan Umum dan Kependudukan
10		00200110003	Penyediaan Perlengkapan Rumah Tangga	jumlah Perlengkapan Rumah Tangga yang disediakan (Dengan SatuanSet)	12	2.440.000	3	0	3	480.000	0	520.000	0	0	0	500.000	86,667	77,211	Kecamatan Umum dan Kependudukan
11		00200110004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah jenis bahan logistik yang disediakan (Dengan SatuanLembar)	4	84.788.300	3	0	3	11.814.300	3	14.329.600	0	0	3	10.043.800	90	98,333	Kecamatan Umum dan Kependudukan
12		00200110005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan (Dengan SatuanSet)	14	76.347.000	10	0	11	17.761.250	13	6.468.350	0	0	11	14.329.600	78,571	61,757	Kecamatan Umum dan Kependudukan
13		00200110008	Pengembangan Rapor Koordinasi dan Komunikasi DPO	jumlah koordinasi dan komunikasi yang dilakukan (Dengan SatuanKali)	10	318.811.000	10	0	20	86.468.001	20	52.011.004	0	0	20	148.519.155	80	45,168	Kecamatan Umum dan Kependudukan
14		002001200	Pengadaan Barang Milik Daerah Perumahan Urusan Pemertarikan Daerah	Penelitian, pengembangan pengadaan barang milik daerah (Dengan Satuan%)	100	76.286.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kecamatan Umum dan Kependudukan	
15		002001201007	Pengadaan Asat Tetap Lainnya	jumlah Asat Tetap Lainnya yang disediakan (Dengan SatuanLembar)	1	76.286.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kecamatan Umum dan Kependudukan	
16		002001200	Pengadaan Jasa Pemertarikan Urusan Pemertarikan Daerah	Penelitian, pengembangan pengadaan jasa (Dengan Satuan%)	100	240.821.300	25	24.100.000	90	44.694.857	70	79.362.107	0	0	70	186.946.794	100	84,952	Kecamatan Umum dan Kependudukan
17		00200120001	Pengadaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	jumlah aparatur internal BKPSDM yang terlayani (Dengan SatuanOrang)	46	105.800.000	44	0	45	45.360.457	45	36.375.027	0	0	45	76.995.484	97,826	72,849	Kecamatan Umum dan Kependudukan

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Biaya Perangkat Daerah Tahun berjalan 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2022								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Biaya Perangkat Daerah yang direalisasi tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Rencana Perangkat Daerah s.d tahun 2022		Berkas Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							I		II		III		IV						
							1	2	3	4	5	6		7		8		9	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
18		0503120803	Pengadaan jasa Peralatan dan Peningkatan Kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara (Dengan Satuan%)	28	16.611.000	8	0	8	1.803.000	17	3.348.300	8	0	17	4.812.500	63,98	62,56	Realisasi Umum dan Kapasitas
19		0503120804	Pengadaan jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah spanduk internal BAPDARD yang terawat (Dengan Satuan-Orang)	48	176.685.000	44	21.180.000	45	42.661.200	49	36.377.600	0	0	45	105.154.800	91,26	95,84	Realisasi Umum dan Kapasitas
20		05031208	Pembekalan Barang M&A Daerah Perunggu untuk Pemeliharaan Daerah	Pembekalan pemeliharaan barang M&A daerah perunggu untuk pemeliharaan daerah (Dengan Satuan%)	100	118.871.800	10	6.610.000	10	36.389.400	71	31.963.200	0	0	71	76.364.500	180	62,30	Realisasi Umum dan Kapasitas
21		0503020800	Pengadaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pagar Kandang Perorangan Dinas atau Perorangan Dinas jabatan	jumlah kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan yang dipelihara (Dengan Satuan%)	1	28.173.400	1	5.440.000	1	6.440.000	1	14.968.900	0	0	1	28.868.900	100	68,57	Realisasi Umum dan Kapasitas
22		0503020800	Pengadaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pagar dan Perorangan Kandang Dinas Operasional atau Lain-lain	jumlah kendaraan dinas operasional atau lainnya yang dipelihara (Dengan Satuan%)	4	56.400.000	4	0	4	30.824.300	4	11.870.100	0	0	4	12.744.600	100	56,15	Realisasi Umum dan Kapasitas
23		0503020800	Pembekalan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lain-lain	jumlah gedung kantor/bangunan lainnya yang dipelihara (Dengan Satuan%)	1	21.496.400	1	3.200.000	1	6.025.000	1	5.025.000	0	0	1	14.496.000	100	66,361	Realisasi Umum dan Kapasitas
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																180,886	62,981		
PROMAT KINERJA																10	0		
24	-	050302	PROGRAM KEPECAWAIAN DAERAH	Rasio pegawai fungsional (Dengan Satuan%)	7,300	1.125.675.400	2,750	37.514.800	3,340	151.435.000	6,450	128.490.000	0	0	6,450	217.641.000	88	28,368	Persentase, Pengadaan, Mutasi dan Data
				Rasio jabatan fungsional yang bersertifikat kompetensi (Dengan Satuan%)	100		70		70		70		0	70		70		Persentase, Pengadaan, Mutasi dan Data	
				Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/ dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) (Dengan Satuan%)	100		17		68		73		0	73		73		Persentase, Pengadaan, Mutasi dan Data	

No	Sumber	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2022		Realisasi Kinerja Pada Trifurasi tahun 2022								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja yang direalisasi tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Rencana Perangkat Daerah s.d tahun 2022		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
							I		II		III		IV						
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
25		00000000	Pengadaan, Pemeliharaan dan Reformasi Kapasitas AKN	Pembacaan, pelaksanaan, pengisian, pemeliharaan dan pemberian informasi menggunakan AKN (Dengan Satuan %)	100	600.000.000	07	37.516.000	66	75.770.000	73	66.375.000	0	0	73	305.614.000	100	33.628	Sub Koordinator Pemeliharaan, Data dan Humas
26		0000020000	Pengukuran Rencana Kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan Pengadaan AKN	Jumlah AKN yang lulus sesuai dengan format yang diijinkan (Dengan Satuan Orang)	100	17.700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sub Koordinator Pengadaan dan Pengendalian
27		0000020000	Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPP	Jumlah AKN yang berhasil menjadi ASN (Dengan Satuan Orang)	100	10.200.000	100	0	100	5.800.000	100	700.000	0	0	100	5.300.000	100	61.012	Sub Koordinator Pembinaan dan Pelatihan
28		0000020000	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pembertahanan	Jumlah SK penuh yang diterbitkan (Dengan Satuan Orang)	100	1.730.000	48	0	73	0	100	0	0	0	100	0	14.074	0	Sub Koordinator Mutasi dan Pembertahanan
29		0000020000	Fasilitas Lembaga Pensiun AKN	Jumlah pelaksanaan pelayanan HUT Korpri (Dengan Satuan event)	1	200.000.000	0	0	1	0.000.000	1	0.000.000	0	0	1	14.700.000	31.320	3.021	Sub Koordinator Pensiun AKN dan Kesejahteraan Pegawai
30		0000020000	Pengukuran Bahan Kebutuhan Pengadaan Data dan Humas AKN	Jumlah data pelayanan pegawai yang diblok dalam aplikasi SAP dan e-milla (Dengan Satuan Data)	0.000	200.000.000	1.500	37.516.000	1.000	66.725.000	1.200	10.725.000	0	0	1.200	157.964.000	76	61.798	Sub Koordinator Pemeliharaan, Data dan Humas
31		0000020000	Pengelolaan Sistem Informasi Kapasitas	Jumlah website yang dibuat dan dimutakhirkan (Dengan Satuan Website)	1	20.000.000	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	100	0	Sub Koordinator Pemeliharaan dan Fasilitas
32		0000020000	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah data kepegawaian yang diinput (Dengan Satuan Orang)	100	37.000.000	100	0	100	0	100	20.000.000	0	0	100	25.000.000	71.400	66.067	Sub Koordinator Pemeliharaan, Data dan Humas
33		00000200	Mutasi dan Promosi PNS	Pembacaan, pelaksanaan mutasi dan promosi ASN (Dengan Satuan %)	100	370.000.000	30	0	47	75.000.000	66	33.431.000	0	0	66	100.000.000	100	16.911	Sub Koordinator Mutasi dan Pembertahanan
34		0000020000	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah PNS yang mengisi formulir mutasi dan surat perintah jabatan hingga (Dengan Satuan Orang)	25	255.122.000	0	0	7	47.500.000	16	29.801.000	0	0	16	17.330.000	76	20.000	Sub Koordinator Mutasi dan Pembertahanan
35		0000020000	Pengelolaan Seleksi Pengkat ASN	Jumlah SK pengkat ASN yang diterbitkan (Dengan Satuan Orang)	100	66.200.000	476	0	476	12.000.000	600	0	0	0	600	11.000.000	100	23.400	Sub Koordinator Pengadaan dan Pengendalian

No	Sistem	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Rencana Perangkat Daerah Tahun berjalan 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2022								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Rencana Perangkat Daerah yang direalisasi tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Rencana Perangkat Daerah s.d tahun 2022		Unit Kerja Perangkat Daerah/ Pemangku/jawab		
							I		II		III		IV								
							1	2	3	4	5	6		7		8		9		10	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
36		05030201001	Pengelolaan Pemenuh ASN	jumlah pelaksanaan Pemenuhan Kati PNS (Dengan Satuan-fkt)	8	18.800.000	1	0	3	8.100.000	7	5.800.000	0	0	7	6.700.000	87,500	12,250	Sub Koordinator Mutasi dan Pindah-pindah		
37		050302000	Pengembangan Kompetensi ASN	Pemenuhan pelaksanaan pengembangan kompetensi ASN (Dengan Satuan-fkt)	100	110.400.000	55	0	90	0	100	4.750.000	0	0	100	4.750.000	100	1.000	Sub Koordinator Pengadaan dan Pengembangan		
38		05030201001	Pengadaan Kapasitas ASN	jumlah ASN yang mengikuti pelatihan, ujian dan sertifikasi mutasi untuk peningkatan kapasitas kinerja ASN (Dengan Satuan-Drng)	30	9.500.000	0	0	12	0	0	4.750.000	0	0	0	4.750.000	100	44.453	Sub Koordinator Pengadaan dan Pengembangan		
39		05030201004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	jumlah ASN Pemula Pengangkatan yang menerima bimbingan daya tugas belajar (Dengan Satuan-Drng)	4	104.000.000	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	100	0	Sub Koordinator Pengembangan dan Sertifikasi		
40		05030201010	Penyediaan Pengembangan Kari dalam jabatan Fungsional	jumlah ASN yang diangkat dalam jabatan Fungsional (Dengan Satuan-Drng)	30	5.500.000	100	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	Sub Koordinator Pengadaan dan Pengembangan		
41		050302000	Penyediaan Fasilitas Kerja Aparatur	Pemenuhan pemenuhan pelayanan dan fasilitas kinerja ASN (Dengan Satuan-fkt)	100	17.925.000	65	0	40	0	60	0	0	0	40	0	100	0	Sub Koordinator Pemeliharaan Data dan Arsip		
42		05030204001	Pemenuhan Pemenuhan dan Evaluasi Kinerja Aparatur	jumlah ASN yang akan dinilai IP ASN dan dipaparkan kinerja aparatur (Dengan Satuan-Drng)	3.000	4.810.000	1.300	0	2.300	0	2.070	0	0	0	2.070	0	69,000	0	Sub Koordinator Pemeliharaan Data dan Arsip		
43		05030204004	Pengelolaan Pembinaan Penghargaan Bagi Pegawai	jumlah ASN yang menerima penghargaan (Dengan Satuan-Drng)	127	8.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sub Koordinator Mutasi dan Pindah-pindah Pegawai		
44		05030204006	Pengelolaan Peningkatan Pelaksanaan Disiplin ASN	jumlah penyelesaian kasus ASN yang disiplin (Dengan Satuan-fkt)	5	1.075.000	4	0	4	0	4	0	0	0	4	0	80	0	Sub Koordinator Mutasi dan Pindah-pindah		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																	79,000	28,300			
PREDIKSI KINERJA																	9	50			
45	-	050402	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Pemenuhan ASN yang mempunyai kapasitas dan kompetensi (Dengan Satuan-fkt)	78	1.114.111.800	1	90.780.000	18	30.000.000	51	20.875.000	0	0	51	161.755.000	65,365	12,213	Pendidikan Pelatihan, Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai		

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Rencana Perangkat Daerah Tahun Berjalan 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2022								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Rencana yang direvisi tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Rencana Perangkat Daerah s/d tahun 2022		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	
							I		II		III		IV							
							1	2	3	4	5	6	7	8						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
46		05040201	Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis (Dengan Satuan/Rp)	300	147.800.000	0	0	30	70.000.000	30	28.975.000	0	0	30	70.075.000	100	49.386	Sub Koordinator Pengembangan dan Sumber	
47		05040201003	Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pribadi bagi jabatan Administrasi, Penyelenggara Urusan Pemerintahan Kekutan, Perangkat Daerah Pemungut, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan, as kompetensi teknis umum dan atau teknis dan fungsi (Dengan Satuan/Rp)	30	147.800.000	0	0	30	70.000.000	30	28.975.000	0	0	30	70.075.000	100	49.386	Sub Koordinator Pengembangan dan Sumber	
48		05040202	Sertifikasi Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase ASN yang mengikuti sertifikasi, kompetensi manajerial dan fungsional (Dengan Satuan/Rp)	300	1.176.931.000	2	80.783.000	2	0	100	0	0	0	100	80.783.000	100	7.714	Sub Koordinator Pendidikan dan Pelatihan	
48		05040202001	Penyenggaraan Pengembangan Kompetensi, Pendidikan Manajerial, jabatan Penguasa, jabatan Fungsional, Keperawatan, dan Keperawatan	Jumlah ASN dan CDR yang mengikuti Pengembangan Kompetensi, Pendidikan Manajerial, jabatan Penguasa, jabatan Fungsional, Keperawatan, dan Keperawatan (Dengan Satuan/Rp)	300	1.176.931.000	2	80.783.000	3	0	100	0	0	0	100	80.783.000	100	7.714	Sub Koordinator Pendidikan dan Pelatihan	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																		49.386	12.713	
PREDIKAT KINERJA																		8	10	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN BERSIS PROGRAM (%)																		87.433	94.528	
PREDIKAT KINERJA																		7	10	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:				- Pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan dan pelaksanaan pemantauan kemajuan kemajuan disesuaikan dengan kebutuhan																
Faktor penghambat pencapaian kinerja:				- Rencanaku pembekalan, uang lembur dan makan minum kegiatan direncanakan untuk kegiatan pengembangan tenaga ppg guru yang ternyata tahun 2021 tetapi pada tahun 2022 tidak dilaksanakan sehingga pemantauan belajar tersebut disesuaikan dengan kebutuhan - Dikarenakan pengalokasian provinsi ASN sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dan dibawah dari target sehingga uang lembur dan honorarium pembekalan dilakukan pemantauan sesuai dengan kebutuhan - Secara realisasi baik telah terpenuhi untuk peningkatan pendidikan dan pmb, untuk pelaksanaan ujian dinas dan penyusunan hasil tidak dilaksanakan dikarenakan kekurangan anggaran sehingga yang belum dilaksanakan untuk pelaksanaan ujian dinas dan penyusunan hasil tidak dapat dilaksanakan - Tidak adanya realisasi disebabkan penunbuannya untuk jasa ekspedisi pengiriman barang, namun untuk pengiriman berkas dari akun Setra Lencana Karya Setra sudah menggunakan deflag (selisi), sehingga tidak digunakan anggaran tersebut - Dikarenakan proses pemeriksaan berkas dan penyusunan berkas dilaksanakan secara langsung ke BKN maka belajar pengiriman berkas dan belajar makan dan minum rapat tidak dapat dilakukan pemantauan - Hal ini dikarenakan ada beberapa PNS Tugan Belajar yang meninggalkan tugas mendapatkan hasil dari Kementerian Republik Indonesia dan Realisasi dari Bepinas serta Realisasi tidak penuh dari Universitas - Kegiatan yang melibatkan kerjasama, moderator, pembawa acara dan panitia tidak dilakukan karena kegiatan tersebut telah dilaksanakan sebelum DPA perbaikan belajar.																

No	Isu/tema	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Setoran Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Rencana Perangkat Daerah Tahun berjalan 2022	Realisasi Kinerja Pada Trimester tahun 2022								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Rencana Perangkat Daerah yang direvisi tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Rencana Perangkat Daerah s/d tahun 2022	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						I		II		III		IV					
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12	13
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
Tidak terdapat yang diperlukan dalam triwulan berikutnya					- melaksanakan proses penilaian anggaran kegiatan sesuai dengan diadwikan												
Tidak terdapat yang diperlukan dalam Rencana Perangkat Daerah kota berikutnya					- melaksanakan proses pencatatan anggaran kegiatan sesuai dengan diadwikan												
Dievaluasi Kota Pangkalpinang, tanggal 07-03-2023 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA PANGKALPINANG  FATHIHAL S.T NIP.198501063009001001																	

TRIWULAN IV
Evaluasi Terhadap Hasil Renja
Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kota Pangkalpinang Tahun 2022

No	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Sesuai Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan tahun 2022								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang diarsipkan tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah s.d tahun 2022		Unit Kerja / Penanggung Jawab
							I		II		III		IV						
							A	Rp	A	Rp	A	Rp	A	Rp	A	Rp	A	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	-	050001	PROGRAM PEMUNGKAPAN DAN PENERBITAHAN BERNAS	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu (Dengan Satuan %)	100	3.875.712.584	100	279.887.547	100	1.175.595.796	100	956.885.134	100	1.154.998.876	100	3.875.539.505	100	92,575	Sekretariat
				Persentase terpenuhinya kebutuhan Administrasi perkantoran (Dengan Satuan %)	100		100		100		100		100		100		100		Sekretariat
				Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik (Dengan Satuan %)	100		100		100		100		100		100		100		Sekretariat
				Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada unit kerjanya (Dengan Satuan %)	100		0		0		100		100		100		100		Sekretariat
2		050001001	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan/penganggaran dan evaluasi kinerja tepat waktu (Dengan Satuan %)	100	6.675.000	0	0	0	0	0	0	100	6.675.000	100	6.675.000	100	100	Kecamatan KEP dan Keuangan
3		050001001001	Evaluasi dan Penyusunan Rencana DPA - SKPD	Jumlah dokumen perbaikan DPA - SKPD yang terakumulasi (Dengan Satuan Dokumen)	1	6.675.000	0	0	0	0	0	0	1	6.675.000	1	6.675.000	100	100	Kecamatan KEP dan Keuangan
4		050001002	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya kebutuhan Administrasi Keuangan (Dengan Satuan %)	100	3.018.733.734	25	348.577.561	50	908.022.296	75	751.855.965	100	733.422.857	100	2.742.879.485	100	90,805	Kecamatan KEP dan Keuangan
5		050001002001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan (Dengan Satuan Orang)	30	3.018.733.734	27	348.577.561	30	908.022.296	38	751.855.965	28	733.422.857	38	2.742.879.485	93,713	90,805	Kecamatan KEP dan Keuangan
6		050001200	ASPEK HUKUM DAN KEPEGAWAIAN Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya Administrasi Kepegawaian (Dengan Satuan %)	100	10.386.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.386.200	100	91	Kecamatan Umum dan Kepegawaian

No	Kategori	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Biaya Perangkat Daerah Tahun berjalan 2022	Realisasi Kinerja Pada Trivulan Tahun 2022								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Biaya Perangkat Daerah yang direalisasi tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Biaya Perangkat Daerah s.d. bulan 2022		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
						I		II		III		IV			2022				
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp			
L	S	S	A	S	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	S	Rp	S	Rp	
7		0100020009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat sesuai tugas dan fungsi (Dengan Satuan Orang)	5	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01 Koordinator Pendidikan dan Pelatihan
8		0100020010	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi umum (Dengan Satuan %)	100	461.443.300	20	0	50	147.637.511	75	78.154.794	100	217.820.827	100	445.814.922	100	96.981	Kasubag Umum dan Kepegawaian
9		0100020008	Pengadaan Kebutuhan Material (Material) Perencanaan Bangunan Kantor	Jumlah Kebutuhan Material (Material) Perencanaan Bangunan Kantor yang disediakan (Dengan Satuan Jari)	11	3.837.000	0	0	11	1.394.000	11	1.105.500	11	2.881.000	11	1.154.500	100	91.814	Kasubag Umum dan Kepegawaian
10		0100020001	Pengadaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan (Dengan Satuan Set)	11	2.940.000	0	0	0	480.000	0	310.000	0	1.000.000	0	1.180.000	86,947	78.731	Kasubag Umum dan Kepegawaian
11		0100020004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik yang disediakan (Dengan Satuan Jari)	4	84.786.100	0	0	0	31.814.200	0	19.229.800	0	22.187.800	0	71.751.800	50	95.107	Kasubag Umum dan Kepegawaian
12		0100020005	Pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan (Dengan Satuan Jari)	14	39.247.000	10	0	11	17.761.200	11	6.486.550	14	11.250.550	100	35.480.750	100	95.401	Kasubag Umum dan Kepegawaian
13		0100020006	Penyediaan dan Penggantian Alat Koordinasi dan Komunikasi SIPD	Jumlah koordinasi dan komunikasi yang dilakukan (Dengan Satuan Kali)	35	320.811.000	10	0	25	96.486.061	28	52.693.094	55	179.708.107	100	304.208.262	100	98.823	Kasubag Umum dan Kepegawaian
14		0100020007	Pengadaan Ruang Hiburan dan Fasilitas Struktural Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pengadaan ruang hiburan dan fasilitas struktural (Dengan Satuan %)	100	78.164.000	0	0	0	0	0	0	100	71.100.000	100	71.100.000	100	92.940	Kasubag Umum dan Kepegawaian
15		0100020002	Pengadaan Alat Tulis Lainnya	Jumlah Alat Tulis Lainnya yang disediakan (Dengan Satuan Lot)	1	70.180.000	0	0	0	0	0	0	0	71.100.000	0	71.100.000	100	97.740	Kasubag Umum dan Kepegawaian
16		0100020003	Pengadaan Jasa Penyediaan Ruang Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya penyediaan jasa (Dengan Satuan %)	100	281.632.300	25	20.160.000	55	84.644.917	75	79.201.127	100	87.483.624	100	274.610.400	100	97.527	Kasubag Umum dan Kepegawaian
17		0100020000	Pengadaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah peralatan internal SIPDMD yang terlayani (Dengan Satuan Orang)	40	107.900.000	44	0	45	40.300.417	41	36.375.027	44	28.927.124	44	104.952.800	91,682	95.123	Kasubag Umum dan Kepegawaian
18		0100020000	Pengadaan Jasa Perawatan dan Perbaikan Kantor	Jumlah perbaikan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki (Dengan Satuan Unit)	20	10.937.000	0	0	0	1.601.800	17	3.240.500	20	9.205.000	100	14.617.000	100	87.657	Kasubag Umum dan Kepegawaian
19		0100020004	Pengadaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah operator internal SIPDMD yang terlayani (Dengan Satuan Orang)	40	108.685.100	44	10.100.000	45	41.681.200	40	38.177.600	44	32.471.700	44	105.610.500	97,932	97.440	Kasubag Umum dan Kepegawaian

No	Kategori	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Kerja Perangkat Daerah Tahun berjalan 2022	Realisasi Kinerja pada Triwulan tahun 2022								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Kerja Perangkat Daerah yang direalisasi tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Rencana Kerja Perangkat Daerah s.d tahun 2022	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						I		II		III		IV								
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
10		05201200	Pembinaan Barang Milik Daerah Perangkat Daerah dan/atau Pemeliharaan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah pemerintah daerah (Dengan Satuan%)	100	113.871.800	25	4.810.000	54	10.284.300	75	31.961.200	100	37.490.000	100	113.860.500	100	93,993	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
11		05201200001	Pengadaan jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan, dan/atau Kendaran Perawatan Dinas atau Kendaran Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan per orang s.d. divisi/kendaraan dinas jabatan yang dipelihara (Dengan SatuanUnit)	1	38.373.400	1	3.480.000	1	6.442.000	1	14.969.400	1	9.185.000	1	38.404.900	100	93,998	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
12		05201200001	Pengadaan jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan, Paka dan Perawatan Kendaran Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara (Dengan SatuanUnit)	4	54.400.000	4	0	4	20.804.300	4	11.970.200	4	31.201.000	4	53.995.400	100	92,458	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
13		05201200001	Pembinaan/Perbaikan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor/bangunan lainnya yang dipelihara (Dengan SatuanUnit)	1	21.490.400	1	1.350.000	1	6.025.000	1	5.025.000	1	4.700.000	1	21.100.000	100	98,147	Kasubag Umum dan Kepegawaian	
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																			100,000	91,925
PREDIKSI KINERJA																			97	97
14	-	050102	PROGRAM KEPERAWATAN DAERAH	Rasio pegawai fungsional (Dengan Satuan%)	7.500	1.110.875.000	2.250	37.514.000	3.540	151.410.000	6.400	128.492.000	7	529.289.000	7	646.730.000	92,333	75,863	PERENCANAAN, PENGADAAN, MUTASI dan DATA	
				Rasio jabatan fungsional yang bersertifikat (Dengan Satuan%)	100		38		70		70		97		97		97	PERENCANAAN, PENGADAAN, MUTASI dan DATA		
				Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/ dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) (Dengan Satuan%)	100		57		64		73		95		95		95	PERENCANAAN, PENGADAAN, MUTASI dan DATA		
15		050602001	Pengadaan, Pemeliharaan dan/atau Penggantian Sarana Prasarana	Persentase pelaksanaan penggantian, pemeliharaan dan pembebasan sarana prasarana ASN (Dengan Satuan%)	100	405.400.000	97	37.514.000	64	76.775.000	73	40.225.000	95	396.321.000	95	500.000.000	100	94,120	Sub Koordinator Perencanaan, Data dan Sistem	
16		05060200001	Pembelian barang habis pakai, jasa dan/atau biaya untuk Pemeliharaan Pengadaan ASN	Jumlah ASN yang lulus ujian dengan format yang diajarkan (Dengan Satuan Orang)	100	17.700.000	0	0	0	0	0	0	100	14.100.000	100	14.100.000	95	76,732	Sub Koordinator Pengadaan dan Pengangkatan	

No	Isi	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Biaya Perangkat Daerah Tahun berjalan 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun 2022								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Biaya Perangkat Daerah yang direalisasi tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Biaya Perangkat Daerah 2022		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
							I		II		III		IV						
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
27		0506201003	Kordinasi dan Fasilitas Pengkajian PNS dan PPK	Jumlah Cakupan yang diangkat menjadi ASN (Dengan Satuan Orang)	367	15.240.000	367	0	367	5.450.000	367	760.000	367	400.000	367	6.800.000	100	44,820	Sub Koordinator Pendidikan dan Pelatihan
28		0506201004	Kordinasi, Pelaksanaan Administrasi dan Pembinaan	Jumlah 36 person yang administratif (Dengan Satuan Orang)	135	7.710.000	48	0	73	0	180	0	142	5.200.000	142	5.200.000	100	66,230	Sub Koordinator Mutasi dan Pemberhentian
29		0506201005	Fasilitas Lembaga Profesi ASN	Jumlah pelaksanaan pelayanan MUTasi (Dengan Satuan Orang)	3	240.000.000	0	0	3	5.400.000	0	8.900.000	3	185.800.000	3	180.000.000	100	71,182	Sub Koordinator Protokol ASN dan Kesejahteraan Pegawai
30		0506201006	Perencanaan, Saluran Informasi, Pengumpulan Data dan Informasi ASN	Jumlah data pelayanan kepegawaian yang dikelola dalam aplikasi SAP dan e-office (Dengan Satuan Data)	3.000	219.840.800	1.500	97.334.000	2.000	64.720.000	2.760	35.770.000	3.270	88.360.000	3.270	246.320.000	100	95,270	Sub Koordinator Perencanaan, Data dan Informasi
31		0506201007	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah website yang dikelola dan dikembangkan (Dengan Satuan Website)	1	25.250.000	1	0	1	0	1	0	1	24.900.000	1	24.900.000	100	98,220	Sub Koordinator Pendidikan dan Pelatihan
32		0506201008	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah data kepegawaian yang dikelola (Dengan Satuan Orang)	500	17.500.000	252	0	269	0	307	25.000.000	300	7.420.000	300	31.420.000	100	66,477	Sub Koordinator Perencanaan, Data dan Informasi
33		0506201009	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase pelaksanaan mutasi dan promosi ASN (Dengan Satuan %)	100	210.600.000	90	0	47	70.800.000	96	33.431.000	96	381.074.000	96	296.165.000	100	77,030	Sub Koordinator Mutasi dan Pemberhentian
34		0506201010	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah PNS yang mengikuti seleksi mutasi dan seleksi jabatan pimpinan tinggi (Dengan Satuan Orang)	25	26.5120.000	0	0	7	47.500.000	19	26.811.000	51	119.589.000	51	196.000.000	100	74,820	Sub Koordinator Mutasi dan Pemberhentian
35		0506201011	Pengelolaan Kenalan Pengantar ASN	Jumlah SK pengantar ASN yang diterbitkan (Dengan Satuan Orang)	600	94.260.000	476	0	476	22.000.000	600	0	676	60.305.000	676	82.363.000	100	67,362	Sub Koordinator Pengadaan dan Pengangkatan
36		0506201012	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah pelaksanaan Pembinaan Karir PNS (Dengan Satuan Orang)	5	10.300.000	1	0	3	6.100.000	7	3.600.000	7	1.200.000	7	16.900.000	87,000	16,477	Sub Koordinator Mutasi dan Pemberhentian
37		0506201013	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase pelaksanaan pengembangan kompetensi ASN (Dengan Satuan %)	100	218.400.000	91	0	91	0	100	4.796.000	100	25.216.000	100	46.852.000	100	31,544	Sub Koordinator Pengadaan dan Pengangkatan
38		0506201014	Peningkatan Kapasitas Kerja ASN	Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan, ujian kelas dan tambahan masa kerja untuk peningkatan kapasitas kerja ASN (Dengan Satuan Orang)	30	9.500.000	0	0	22	0	30	4.706.000	30	0	30	9.706.000	100	66,850	Sub Koordinator Pengadaan dan Pengangkatan

No	Kategori	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Biaya Perangkat Daerah Tahun berjalan 2022		Realisasi Kinerja Pada Triwulan Tahun 2022								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Biaya Perangkat Daerah yang diwujudkan tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Biaya Perangkat Daerah s/d tahun 2022		Unit Kerja Penyelenggara/Instansi
							I		II		III		IV						
							1	2	3	4	5	6	7	8					
1	2	3	4	5	6	7p	8	9p	10	11p	12	13	14	15	16	17	18		
39		0506220004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN Peserta Pengkalsining yang menerima bantuan biaya tugas belajar (Dengan SatuanOrg)	4	104.000.000	0	0	4	0	4	0	0	30.439.000	0	30.439.000	100	15,298	Sub Koordinator Pengembangan dan Sertifikasi
40		0506220004	Fasilitasi Pengembangan Kapir dalam jabatan Fungsional	Jumlah ASN yang diangkat dalam jabatan Fungsional (Dengan SatuanOrg)	30	5.900.000	100	0	100	0	100	0	100	4.817.000	100	4.817.000	100	63,321	Sub Koordinator Pengadaan dan Pengembangan
41		050622004	Pertukaran Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase pelaksanaan pertukaran dan evaluasi kinerja ASN (Dengan Satuan%)	100	17.525.000	43	0	49	0	44	0	94	6.576.000	94	6.576.000	100	37,736	Sub Koordinator Pemecutan, Bala dan Informasi
42		0506220003	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah ASN yang akan dinilai (JP ASN) dan diwujudkan kinerja aparatur (Dengan SatuanOrg)	1.000	6.818.000	1.000	0	1.000	0	1.079	0	1.764	6.119.000	1.764	6.119.000	91,376	69,651	Sub Koordinator Pemecutan, Bala dan Informasi
43		0506220004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang menerima penghargaan (Dengan SatuanOrg)	527	8.890.000	0	0	0	0	0	0	299	0	299	0	91,437	0	Sub Koordinator Promosi ASN dan Kembangkan Pegawai
44		0506220009	Pengelolaan Pengeluaran Anggaran Budget ASN	Jumlah penyelesaian masa ASN yang terintegrasi (Dengan SatuanOrg)	5	1.875.000	4	0	4	0	4	0	9	459.000	9	459.000	100	24,460	Sub Koordinator Mutasi dan Pembastutan
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)																		95,111	75,663
PREDIKAT KINERJA																		BT	+
45	-	050462	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang mempunyai kapasitas dan kompetensi (Dengan Satuan%)	78	1.124.933.000	1	90.783.890	14	50.886.000	31	26.675.000	78	1.087.389.736	78	1.209.127.736	100	95,864	Pendukung Pelatiban, Pengembangan dan Kesejahteraan Pegawai
46		05040101	Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis (Dengan Satuan%)	100	141.800.000	0	0	0	0	0	0	100	30.458.000	100	121.414.000	100	82,273	Sub Koordinator Pengembangan dan Sertifikasi
47		0504010101	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pribadi bagi Jajaran Subintansi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Kabupaten, Perangkat Daerah Percontohan, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis umum dan (DIBERIKAN) secara langsung (Dengan SatuanOrg)	90	141.800.000	0	0	30	50.000.000	30	10.975.000	74	30.458.000	74	121.414.000	100	82,273	Sub Koordinator Pengembangan dan Sertifikasi

No	Bantuan	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Biaya Perangkat Daerah Tahun berjalan 2022	Realisasi Kinerja Pada Tridimensi tahun 2022								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Biaya yang direvisi tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Biaya Perangkat Daerah WJ tahun 2022	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	
						I		S		M		M					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
48		00401200	Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase ASN yang mengikuti sertifikasi keprofesionalan (Dengan Satuan %)	100	1.174.811.000	1	90.781.000	2	0	0	100	0	100	1.174.811.000	100	Sus. Koordinator Pendidikan dan Kelembagaan
49		0040200007	Pengembangan Kompetensi SAGI Pimpinan Daerah, Jabatan Fungsional, Keperimbangan, dan Insentif	Jumlah ASN dan CASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi, Pendidikan Pelatihan, Keperimbangan dan Insentif (Dengan Satuan Orang)	100	1.174.811.000	0	90.781.000	0	0	0	100	0	100	1.174.811.000	100	Sus. Koordinator Pendidikan dan Kelembagaan
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)														100,000	97,884		
PREDIKAT KINERJA														BT	BT		
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN SEMUA PROGRAM (%)														98,387	97,384		
PREDIKAT KINERJA														BT	BT		
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:				- Pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan dan pelaksanaan pencapaian keuangan telah diselesaikan dengan kebutuhan													
Faktor penghambat pencapaian kinerja:				- Honorarium pembahas, uang lembur dan makan minum kegiatan direncanakan untuk kegiatan pengangkatan tenaga PPPK guru yang terdapat tahun 2021 tetapi pada tahun 2022 tidak dilaksanakan sehingga pemotongan belanja tersebut diselesaikan dengan kebutuhan - Dibarengkan pengisian prestasi ASN sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dan dibawah dari target sehingga uang lembur dan honorarium pembahas dilakukan pemotongan sesuai dengan kebutuhan - Secara realisasi RPA telah terpenuhi untuk peningkatan pendidikan dan ptk, untuk pelaksanaan ujian dinas dan penempatan tidak dapat dilaksanakan dikarenakan kekurangan anggaran sehingga uang lembur dialokasikan untuk pelaksanaan ujian dinas dan penempatan tidak dapat dilaksanakan - Tidak adanya realisasi disetorannya untuk jasa ekspedisi pengiriman barang, namun untuk pengiriman barang dari satuan Satya Lencana Karya Satya sudah menggunakan daring (online), sehingga tidak digunakan anggaran tersebut - Dikarenakan proses pemeriksaan berkas dan penyerahan berkas dilaksanakan secara langsung ke SKN maka belanja pengiriman berkas dan belanja makanan dan minuman rapat tidak dapat dilakukan secara penuh - Hal ini dikarenakan ada beberapa PNS Tugan Belanja yang meninggalkan tugas mendapatkan beasiswa penuh dari Kementerian Republik Indonesia dan Beasiswa dari Bappenas serta Beasiswa tidak penuh dari Universitas - Kegiatan yang melibatkan narasumber, moderator, pembawa acara dan peserta tidak dilakukan karena kegiatan tersebut telah dilaksanakan sebelum DPA perubahan tahun.													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tridimensi berikutnya:				- Melaksanakan proses pelatihan anggaran kegiatan sesuai dengan dijabarkan													
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renc. Perangkat Daerah kota berikutnya:				- Melaksanakan proses pelatihan anggaran kegiatan sesuai dengan dijabarkan													

No	Sebaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Rencana Perangkat Daerah Tahun berjalan 2022	Realisasi Kinerja Pada Trivulan tahun 2022								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Rencana Perangkat Daerah yang direalisasi tahun 2022	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Rencana Perangkat Daerah s/d tahun 2022	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab				
						I				II							III			
						R	Kp	R	Kp	R	Kp	R	Kp				R	Kp	R	Kp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					

Direvaluasi
Kota Pangkalpinang, tanggal 24-01-2023

PE. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KOTA PANGKALPINANG



LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
SUMBER DANA APBD KOTA PANGKALPINANG TAHUN ANGGARAN 2022

UNIT KERJA : BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH KOTA PANGKALPINANG
BULAN : Desember

No	Program / Kegiatan	Kegiatan	Volume	Satuan	Plafond Dana (Rp)		Realisasi			Sumber Dana	Ket
					Sebelum Perubahan	Setelah Refocusing	Keuangan		Fisik (%)		
							Rp	(%)			
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota										
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD Belanja lembur	1	dokumen	-	6,675,000	6,675,000	100.00	100	APBD Kota PKP	1 dokumen sesuai dengan kebutuhan koordinasi penyusunan DPA-SKPD
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Belanja Gaji Pokok PNS Belanja Tunjangan Keluarga PNS Belanja Tunjangan Jabatan PNS Belanja Tunjangan Fungsional PNS Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS Belanja Tunjangan Bersas PNS Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS Belanja Pembulatan Gaji PNS Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa Belanja Jasa Tenaga Administrasi Belanja Juran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	30	Orang	14,810,413,500 14,124,589,368 127,321,093 106,199,000 43,050,000 20,879,250 85,216,614 1,497,193 10,734 242,146,248 23,640,000 6,772,800 27,091,200 2,523,200	3,019,733,734 1,357,711,191 133,444,252 129,508,750 43,050,000 31,516,500 93,530,430 1,497,193 28,802 1,171,320,242 48,002,374 828,000 6,772,800 2,523,200	2,742,078,485 1,247,133,140 125,283,785 114,554,950 40,500,000 26,458,000 86,397,060 931,214 15,356 1,057,648,000 43,143,000 - - - -	90.81	100	APBD Kota PKP	28 Orang jumlah PNS per Desember Tahun 2022
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi - Belanja jasa kontribusi asuransi	5	Orang	10,000,000 - 10,000,000	10,000,000 - 10,000,000	9,100,000 - 9,100,000	91.00	100	APBD Kota PKP	4 orang, karena kontribusi masing-masing peserta sejumlah Rp. 2.275.000 sehingga hanya cukup untuk membiayai kontribusi peserta sebanyak 4 orang
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor - Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- Alat Listrik - Belanja Honorarium pengadaan barang / jasa - Belanja lainnya 2 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11 12	Jenis set	4,439,000 4,439,000 459,000 3,500 2,940,000	5,194,500 5,194,500 459,000 3,500 2,940,000	5,194,500 5,194,500 - - 2,300,000	91.82	100	APBD Kota PKP	11 jenis sesuai dengan kebutuhan penyediaan komponen instalasi listrik

No	Program / Kegiatan	Kegiatan	Volume	Satuan	Plafond Dana (Rp)		Realisasi			Sumber Dana	Cat
					Sebelum Perubahan	Setelah Revisi	Estimasi		Fisik (%)		
							Rp	(%)			
		- Belanja bahan - isi tabung pemadam kebakaran			1.500.000	1.500.000	1.500.000				hari penyediaan peralatan
		- Belanja bahan - isi tabung gas			1.440.000	960.000	800.000				rumah tangga
		- Belanja Honorarium pengadaan barang / jasa				459.000					
		- Belanja lainnya				21.000					
	3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4	Zeris	76.201.000	84.788.500	72.211.810	85.17	100	APBD Kota PKP	2 jenis sesuai dengan kebutu
		- Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- ATK			73.201.000	76.078.500	67.991.810				hari penyediaan bahan
		- Belanja makanan dan minuman jasanya tamu			3.000.000	8.250.000	4.620.000				logistik kantor
		- Belanja Honorarium pengadaan barang / jasa				459.000					
		- Belanja lainnya				1.000					
	4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14	Set	48.711.050	37.647.050	35.480.350	94.24	100	APBD Kota PKP	14 set sesuai dengan penyedi
		- Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- Bahan Cetak			48.711.050	37.187.850	35.480.350				aan barang cetak dan
		- Belanja Honorarium pengadaan barang / jasa				459.000					pengadaan
		- Belanja lainnya				200					
	5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35	kali	150.000.000	328.811.000	328.228.262	99.82	100	APBD Kota PKP	35 kali sesuai dengan kebutu
		-Belanja perjalanan dinas biasa			150.000.000	328.352.000	328.228.262				hari penyelenggaraan rapat
		- Belanja Honorarium pengadaan barang / jasa				459.000					dan konsultasi SKPD
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Pemungut Urusan Pemerintah Daerah	1. Pengadaan Aset Tetap Lainnya	1	Unit		78.166.000	72.109.000	92.24	100	APBD Kota PKP	8 unit sesuai dengan kebutu
		- Belanja Modal Aset Pendingin				13.000.000	9.900.000				kegiatan tersebut telah
		- Belanja Honorarium pengadaan barang / jasa				459.000					terkumpul sebelum pengajuan
		- Belanja Modal Personal Computer				45.000.000	45.000.000				anggaran perubahan
		- Belanja Modal Peralatan Personal Computer				7.006.000	5.800.000				pengadaan aset tetap
		- Belanja Modal Peralatan Computer lainnya				12.701.000	11.800.000				lainnya
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urutan Pemerintah Daerah	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	46	Orang	105.900.000	107.500.000	104.962.688	97.64	100	APBD Kota PKP	44 orang sesuai dengan
		- Belanja tagihan telepon			1.500.000	1.100.000	1.028.473				kebutuhan penyediaan jasa
		- Belanja tagihan listrik			60.000.000	63.000.000	61.996.035				komunikasi, sumber daya air
		- Belanja tagihan internet			44.400.000	43.400.000	42.338.200				dan listrik
		2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	26	Unit	10.993.000	16.037.000	14.057.996	87.66	100	APBD Kota PKP	26 unit sesuai dengan kebu
		- Belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga - alat rumah tangga - alat pendingin			2.035.000	3.700.000	3.700.000				ruhan penyediaan jasa
		- Belanja pemeliharaan komputer - komputer unit - Personal Computer			5.585.500	6.212.000	4.709.000				peralatan dan perlengkapan
		- Belanja pemeliharaan komputer - Peralatan komputer - Peralatan Personal Computer			3.372.500	5.648.500	5.648.500				kantor
		- Belanja Honorarium pengadaan barang / jasa				459.000					
		- Belanja lainnya				17.500					
		3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	46	Orang	160.012.500	159.685.500	158.610.906	97.45	100	APBD Kota PKP	44 orang sesuai dengan
		- Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- ATK			480.000	120.000	-				kebutuhan penyediaan

No	Program / Kegiatan	Kegiatan	Volume	Satuan	Plafond Dana (Rp)		Realisasi			Sumber Dana	Ket
					Sebelum Perubahan	Setelah Refocusing	Keuangan		Fiskal (%)		
							Rp	(%)			
		- Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- benda pos			5.000.000	3.640.000	3.200.000				jasa pelayanan umum kantor
		- Belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor- alat / bahan untuk kegiatan kantor lainnya			6.342.100	7.276.100	7.210.500				
		- Belanja jasa tenaga administrasi			103.993.600	103.993.600	102.400.000				
		- Belanja jasa tenaga kebersihan			42.996.800	42.996.800	42.200.000				
		- Belanja jasa pengolahan sampah			1.200.000	1.200.000	800.000				
		- Belanja Honorarium pengadaan barang / jasa				459.000					
7	Peneliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	1	unit	34.873.400	39.173.400	36.464.900	93,09	100	APBD Kota PKP	1 unit sesuai dengan kebutuhan penyediaan jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
		- Belanja jasa tenaga supir			22.158.400	22.158.400	20.000.000				
		- Belanja pembayaran pajak, bea dan perizinan			1.315.000	1.315.000	1.284.900				
		- Belanja pemeliharaan alat angkutan - alat angkutan darat bermotor - kendaraan bermotor perorangan			11.400.000	15.241.000	15.150.000				
		- Belanja Honorarium pengadaan barang / jasa				459.000					
		2. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4	unit	38.400.000	58.400.000	53.995.650	92,45	100	APBD Kota PKP	4 unit sesuai dengan kebutuhan penyediaan jasa pemeliharaan , biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
		- Belanja pembayaran pajak, bea dan perizinan			7.200.000	7.200.000	3.313.300				
		- Belanja pemeliharaan alat angkutan - alat angkutan darat bermotor - kendaraan bermotor penumpang			31.200.000	50.741.000	50.682.350				
		- Belanja Honorarium pengadaan barang / jasa				459.000					
		3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	unit	21.498.400	21.498.400	21.100.000	98,15	100	APBD Kota PKP	1 unit sesuai dengan kebutuhan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
		- Belanja jasa tenaga keamanan			21.498.400	21.498.400	21.100.000				
	Program Kepegawaian Daerah										
1	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	1. Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	200	orang	17.700.000	17.700.000	14.109.000	79,71	100	APBD Kota PKP	130 orang kesehatan 12 orang dan guru 118 orang
		- Belanja Honorarium pengadaan barang / jasa				459.000	459.000				Formasi yang ditetapkan sesuai dengan KEMENPAN
		- Belanja lembur			17.700.000	17.238.000	13.650.000				
		- Belanja lainnya				3.000					
		2. Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPK	387	orang	8.160.000	15.260.000	6.809.000	44,62	100	APBD Kota PKP	387 orang sesuai dengan kebutuhan
		- Honorarium narasumber atau pembahas, moderator pembawa acara dan panitia			2.300.000	4.800.000	2.300.000				151 CPNS
		- Belanja lembur			5.860.000	7.480.000	4.050.000				118 PPK Tahap 1
		- Belanja Honorarium pengadaan barang / jasa				459.000	459.000				118 PPK Tahap 2
		- Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas lapangan				2.520.000					
		- Belanja lainnya				1.000					

No	Program / Kegiatan	Kegiatan	Volume	Satuan	Plafond Dana (Rp)		Realisasi			Sumber Dana	Ket
					Sebelum Perubahan	Setelah Refocusing	Keuangan		Fisik (%)		
							Rp	(%)			
	3	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	135	orang	2.750.000	7.710.000	5.259.000	68.21	100	APBDP Kota PKP	142 Orang PNS yang
		- Belanja paket/pengiriman			2.500.000	200.000					memasuki masa pensiun
		- Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas lapangan				2.550.000	2.550.000				
		- Belanja Honorarium pengadaan barang / jasa				459.000	459.000.00				
		- Honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia				4.500.000	2.250.000				
		- Belanja lainnya				1.000					
		- Belanja Makanan dan Minuman rapat			250.000						
	4	Facilitasi Lembaga Profesi ASN	3	event	51.000.000	246.100.000	180.100.000	73.18	100	APBDP Kota PKP	3 Event sesuai dengan
		- Belanja makanan dan minuman aktivitas lapangan			51.000.000	46.185.000	46.185.000				kebutuhan
		- Belanja Honorarium pengadaan barang / jasa				765.000	765.000				
		- Belanja pakisan dinas lapangan				25.600.000	25.600.000				
		- Honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia				23.800.000	8.300.000				
		- Belanja jasa juri perlombaan / pertandingan				45.000.000	8.000.000				
		- Belanja sewa alat kantor lainnya				10.000.000	10.000.000				
		- Belanja hadiah yang bersifat perlombaan				67.750.000	64.250.000				
		- Belanja sewa alat musik				7.000.000	7.000.000				
		- Belanja sewa alat studio lainnya				20.000.000	10.000.000				
	5	Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	3000	Data	246.860.600	255.860.600	246.329.000	96.27	100	APBDP Kota PKP	3275 Data sesuai dengan
		- Belanja makanan dan minuman rapat			450.000	300.000					kebutuhan
		- Belanja jasa tenaga administrasi			235.485.600	235.485.600	231.900.000				
		- Belanja lembur			10.925.000	8.810.000	8.870.000				
		- Belanja Honorarium pengadaan barang / jasa				459.000	459.000				
		- Belanja lainnya				6.000					
		- Honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia				10.800.000	8.100.000				
	6	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1	website	25.350.000	25.350.000	24.900.000	98.22	100	APBD Kota PKP	1 website sesuai dengan
		- Honorarium tim penyusun jurnal, buletin, majalah, pengelola teknologi informasi dan pengelola website			24.900.000	24.900.000	24.900.000				kebutuhan
		- Belanja makanan dan Minuman Rapat			450.000	450.000					
	7	Pengelolaan Data Kepegawaian	500	orang	37.500.000	37.500.000	32.429.000	86.48	100	APBDP Kota PKP	500 orang sesuai dengan
		- Belanja Modal Mesin Proses			25.000.000	25.000.000	25.000.000				kebutuhan
		- Belanja lembur			10.400.000	10.400.000	8.970.000				
		- Belanja Makanan dan Minuman Rapat			600.000	125.000					
		- Belanja paket/pengiriman			1.500.000	1.500.000					
		- Belanja Honorarium pengadaan barang / jasa				459.000	459.000				
		- Belanja lainnya				16.000					

No	Program / Kegiatan	Kegiatan	Volume	Satuan	Plafond Dana (Rp)		Realisasi			Sumber Dana	Ket
					Sebelum Perubahan	Setelah Refocusing	Keuangan		Fiskal (%)		
							Rp	(%)			
2	Mutasi dan Promosi ASN	1. Pengelolaan Mutasi ASN	25	orang	107,670,000	263,120,000	196,900,000	74.83	100	APBDP Kota PKP	53 Orang sesuai dengan
		- Belanja Lembur			6,370,000	15,312,000	12,071,000				kebutuhan
		- Honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia			89,800,000	227,800,000	172,800,000				29 JPT
		- Belanja jasa iklan/reklame, film dan pemotretan			10,000,000	10,000,000	3,000,000				4 Mutasi masuk
		- Belanja paket/pengiriman			1,500,000	300,000					20 Mutasi keluar
		- Belanja Makanan dan minuman aktivitas lapangan				9,235,000	8,570,000				
		- Belanja Honorarium pengadaan barang / jasa				459,000	459,000				
		- Belanja lainnya				14,000					
		2. Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	600	orang	36,860,000	94,260,000	82,365,950	87.38	100	APBDP Kota PKP	675 Orang sesuai dengan
		- Belanja makanan dan minuman jamuan tamu			-	-					kebutuhan untuk kenaikan
		- Honorarium narasumber atau pembahas			10,200,000	42,000,000	39,750,000				pangkat ASN
		- Belanja paket/pengiriman			1,500,000	-					
		- Belanja lembur			25,160,000	26,760,000	23,292,000				
		- Belanja Honorarium pengadaan barang / jasa				459,000	459,000				
		- Belanja Perjalanan dinas paket meeting dalam kota				25,000,000	18,864,950				
		- Belanja lainnya				41,000					
		3. Pengelolaan Promosi ASN	11	kali	42,400,000	19,300,000	10,960,000	56.48	100	APBDP Kota PKP	7 Kali sesuai dengan
		- Belanja Lembur			8,500,000	8,500,000	4,500,000				rekomendasi Walikota sampai
		- Honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia			33,900,000	10,800,000	6,400,000				akhir tahun pelaksanaan
											mutasi promosi ASN
3	Pengembangan Kompetensi ASN	1. Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	30	orang	58,150,000	9,500,000	4,756,000	49.85	100	APBDP Kota PKP	30 Orang sesuai dengan
		- Honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia			38,900,000	-					peningkatan pendidikan
		- Belanja Lembur			9,500,000	9,500,000	4,756,000				dan penyesuaian masa kerja

[illegible]

No	Program / Kegiatan	Kegiatan	Volume	Satuan	Plafond Dana (Rp)		Realisasi			Sumber Dana	Ket
					Sebelum Perubahan	Setelah Refocusing	Keuangan		Fisik (%)		
							Rp	(%)			
1	Pengembangan Kompetensi Teknis	1. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum - Belanja makanan dan minuman rapat - Honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia - Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi - Belanja Honorarium pengadaan barang / jasa - Belanja lainnya	50	orang	93,300,000	147,600,000	121,434,000	82.27	100	APBDP Kota PKP	74 orang karena anggaran cukup untuk melakukan kegiatan yang pesertanya melebihi target yang telah ditentukan
					400,000	-					
					13,900,000	18,100,000					
					79,000,000	129,000,000	120,975,000				
						459,000	459,000				
						41,000					
2	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	1. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan - Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi - Belanja Paksiat dinas lapangan - Belanja jasa penyelenggara acara - Belanja Perjalanan dinas	196	orang	1,041,480,000	1,176,911,000	1,137,699,736	96.57	100	APBDP Kota PKP	193 orang mengikuti LATSAR dan 3 orang mengikuti PCN karena perubahan anggaran kontribusi, maka peserta yang dikirimkan dapat lebih banyak dari target yang telah ditentukan sebanyak 196 orang
					1,041,480,000	1,105,963,000	1,105,963,000				
						12,500,000	10,800,000				
						36,800,000					
						21,648,000	21,300,000				
		Total sampai dengan bulan ini			17,367,327,480	6,420,299,184	5,765,418,251	90	100		

Pangkalpinang, Desember 2022

Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

